

**LAPORAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial
Pemerintah Kabupaten Magetan



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB IPENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	5
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	7
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	7
1. Kepegawaian	7
2. Sarana dan Prasarana	10
3. Anggaran (setelah perubahan)	10
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH	11
F. LANDASAN HUKUM	11
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB IIPERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)	14
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	16
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	17
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)	24
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	25
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	28
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	31
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	44
D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	54
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA	66
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	68
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025	68

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	83
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	85
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;	87
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:	88
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	94
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025	96
D. INOVASI TAHUN 2025	100
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025	102
BAB IVPENUTUP	104
A. SIMPULAN	104
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026	107
LAMPIRAN	112
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD	112
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD	112
C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya	112
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya	112
E. Pengukuran Kinerja	112
F. Pohon Kinerja	112
G. Rencana Aksi Tahun 2026	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang sosial, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;

2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

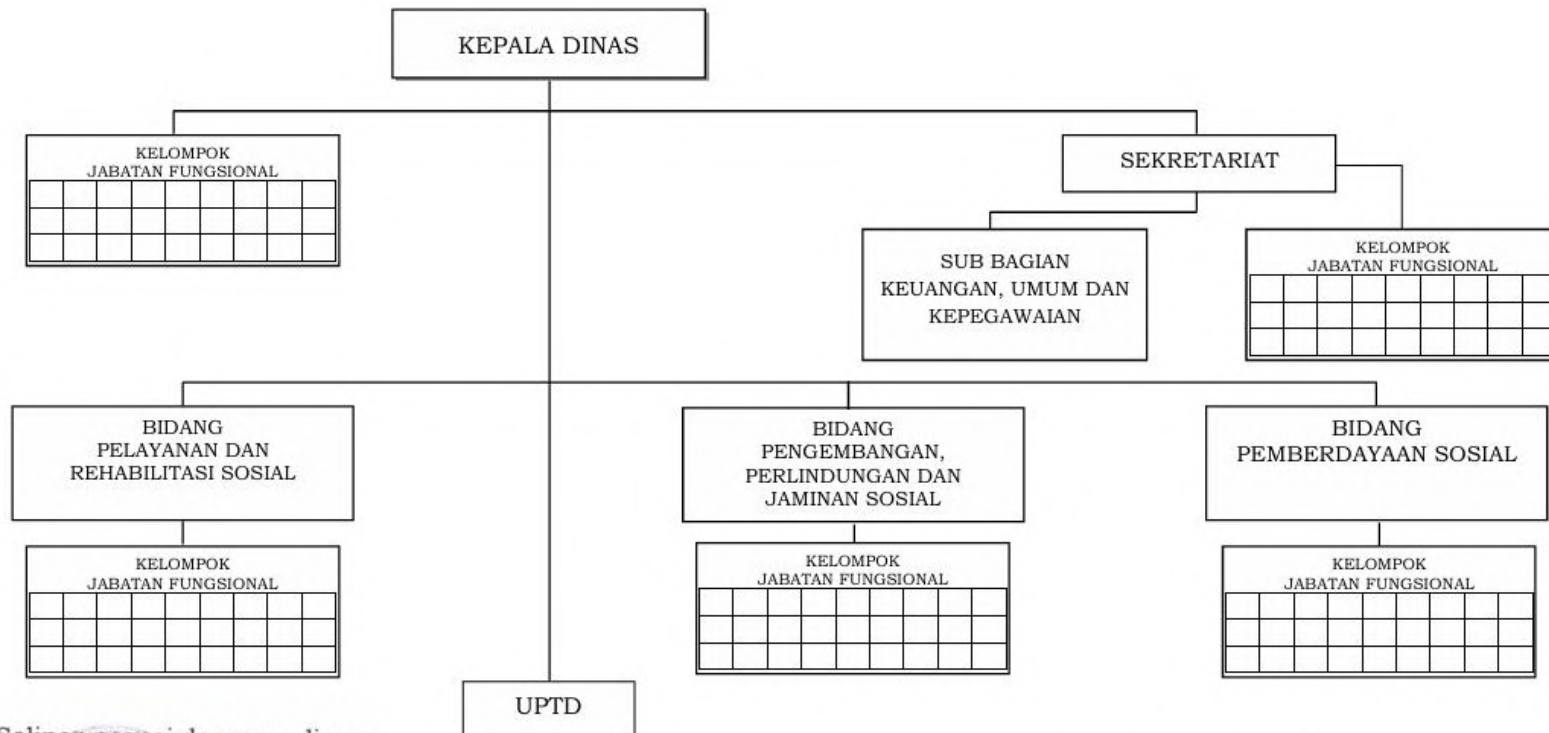
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1
Susunan Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Magetan



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan / Kelebihan (Orang)
I	Kepala Dinas Sosial	1	1	0
II	Sekretaris Dinas Sosial	1	0	-1
1	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	1	1	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
3	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
4	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan / Kelebihan (Orang)
5	Pengolah Data Dan Informasi	2	1	-1
6	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	-1
7	Operator Layanan Operasional	5	4	-1
8	Operator Layanan Operasional	1	1	0
9	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
10	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
12	Fasilitator Pemerintahan	1	0	-1
13	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
III	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	1	0
1	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	2	2	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	-2
3	Fasilitator Pemerintahan	2	2	0
4	Penata Layanan Operasional	2	1	-1
5	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
6	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	-1
7	Operator Layanan Operasional	8	8	0
IV	Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1	0
1	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	3	3	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	-2
3	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
4	Penata Layanan Operasional	1	1	0
5	Pengolah Data Dan Informasi	3	1	-2
6	Operator Layanan Operasional	1	1	0
V	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	0
1	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	3	2	-1
2	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	-2
3	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
4	Pengolah Data Dan Informasi	3	0	-3
5	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
VI	Jabatan Fungsional Tertentu			0
1	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	-2
2	JF Perencana Ahli Madya	1	0	-1
3	JF Pekerja Sosial Ahli Madya	3	0	-3
4	JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	6	0	-6
5	JF Penyuluh Sosial Ahli Madya	1	0	-1
6	JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	1	0	-1
7	JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1	0	-1
8	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
9	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan / Kelebihan (Orang)
10	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
11	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
Jumlah		84	42	-42

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	3
5	Penata Tk.I/III-d	9
6	Penata/III-c	0
7	Penata Muda Tk.I/III-b	3
8	Penata Muda/III-a	7
9	Pengatur Tk.I/II-d	3
10	Pengatur/II-c	0
11	Pengatur Muda Tk.I/II-b	0
12	Pengatur/IIa	1
Jumlah		27

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	4
3	Strata 1/Sederajat	19
4	Diploma	4
5	SMA/Sederajat	14
6	SMP/Sederajat	0
7	SD/Sederajat	1
Jumlah		42

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	20

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
2	Perempuan	22
	Jumlah	42

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Magetan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Sosial Kabupaten Magetan
per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	84.093.652	-	-	84.093.652
2	Peralatan dan Mesin	2.877.939.319	62.057.949	-	2.939.997.268
3	Gedung dan Bangunan	21.860.835.242	-	-	21.860.835.242
	Jumlah	24.822.868.213	62.057.949	-	24.884.926.162

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 16.502.211.179 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.144.250.014	4.393.154.432
Program Pemberdayaan Sosial	5.984.036.325	485.000.000

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Rehabilitasi Sosial	2.252.960.990	1.695.000.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.888.465.600	3.560.559.000
Program Penanganan Bencana	134.843.150	81.041.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	97.655.100	50.000.000

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Pelayanan kesehatan lanjut usia yang belum optimal;
2. Adanya masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatan;
3. Penyusunan dan pengelolaan Data Sosial Terpadu yang belum optimal, sehingga perencanaan kinerja menjadi kurang valid dan belum dapat menggambarkan keberhasilan dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025; dan
8. Keputusan Bupati Magetan 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Tujuan Bupati Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan (RPD) ke- III Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Persentase Penduduk Miskin
Sasaran (RPD) Ke- I Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan Indikator: Indeks Kedalaman Kemiskinan
Tujuan (Renstra) Meningkatnya Kesejahteraan PPKS Indikator: Persentase PPKS yang Meningkatkan Derajat Kesejahteraannya
Sasaran (Renstra) ke- I Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator: Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sasaran (Renstra) ke- II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Indikator: Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Sasaran (Renstra) ke- III Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS Indikator: Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial
Sasaran (Renstra) ke- IV Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator: Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Sasaran (Renstra) ke- V Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial Indikator: 1. Nilai SAKIP Dinas Sosial 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial

**1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026
(berdasarkan Renstra RPD)**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS			Persentase PPKS yang Meningkatkan Derajat Kesejahteraannya	Persen	100	100	100
		1.1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	99,88	99,89	99,90
		1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	0,28	0,29	0,30

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1.3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persen	0,04	0,05	0,06
		1.4. Meningkatkan Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	5,30	5,40	5,50
		1.5. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	85	89	90,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,35	87,50	88,00

Sumber: Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
SASARAN : Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	1. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Bantuan Sosial Dengan Menggunakan Sasaran Data Kemiskinan Terpadu Serta Memperkuat Basis Data Kemiskinan	1. Peningkatan Jaminan Kesehatan 2. Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS 3. Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana 4. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi Kecamatan pada dan Desa/Kelurahan dalam Updating DTKS
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dengan Menggunakan Sasaran Data Kemiskinan Terpadu	1. Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS 2. Pelaksanaan Pembinaan bagi PPKS
	3. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Penguatan Upaya Pemberdayaan Usaha bagi PPKS	1. Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya 2. Pemberdayaan Sosial Melalui Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi PPKS
	4. Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Menggali dan Memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Serta Memperluas Dan Memperkuat Jaringan Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan, pangan, papan dan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n). PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial ----- x 100% Jumlah Keseluruhan PPKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	3.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n). PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga,	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial ----- x 100% Jumlah Keseluruhan PPKS	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).		
Sasaran 3: Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS		Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pemberdayaan usaha termasuk PPKS yang terfasilitasi pelatihan pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n). PPKS (Pemerlu Pelayanan	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial ----- x 100% Jumlah Keseluruhan PPKS	Bidang Pemberdayaan Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).		
Sasaran 4: Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	Perbandingan Jumlah PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PSKS tahun (n) Potensi dan	Jumlah PSKS yang Berkontribusi Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ----- x 100% Jumlah Keseluruhan PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya		

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
Misi (RPJMD) ke- 4 MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatnya Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
Tujuan (RPJMD) ke- 4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Angka Kemiskinan
Sasaran (RPJMD) ke- 1 Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat Indikator: Indeks Kesejahteraan Sosial
Tujuan (Renstra) ke- 1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Indikator: Indeks Kesejahteraan Sosial
Sasaran (Renstra) ke- 1 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator: Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar
Sasaran (Renstra) ke- 2 Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Indikator: Nilai Dimensi Peranan Sosial
Sasaran (Renstra) ke- 3 Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator: Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi
Sasaran (Renstra) ke- 4 Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial Indikator: Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman

Sasaran (Renstra) ke- 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial
Indikator: Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,60	66,65	66,80	67,00	67,15
		1.1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Angka	58,83	58,84	58,85	58,86	58,87
		1.2	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Angka	76,87	76,88	76,89	76,90	76,91
		1.3	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Angka	60,09	60,10	60,11	60,12	60,13
		1.4	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	%	31,31	31,32	31,33	31,34	31,35

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	92,34	93,32	93,33	93,34	93,35
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	87,50	87,65	87,70	87,75	87,80

Sumber: Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025 - 2029

VISI : MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN			
MISI ke- IV : MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskindan Rentan	- Pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan - Pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi sebagai proses optimalisasi data yang lebih akurat	- Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) - Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) - Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana - Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) - Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Updating Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) - Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Tepat Sasaran

	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis		- Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskindan Rentan	- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan - Memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemandirian dengan tujuan mentas dari kemiskinan	- Pemberdayaan Sosial Melalui Pelatihan Usaha dan Fasilitas Pelatihan Usaha bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) - Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Modal Usaha bagi Perorangan, WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	- Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan	- Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN														
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA												
Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	1.1	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Angka	Dimensi Kebutuhan Dasar: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. (n) merupakan jumlah banyak Variabel. Dimensi kebutuhan dasar dibangun dari beberapa Kumpulan variabel (pangan, papan / hunian, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, physicalmobility, rasa aman). Variabel Pangan dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ketahanan Pangan</td><td>Kecukupan pangan individu</td><td>DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kecukupan Gizi</td><td>Akses & kualitas konsumsi pangan</td><td>BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr></table>	No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)	2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)	$\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$	Dinas Sosial Kabupaten Magetan
No.	Indikator	Item	Sumber Data															
1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)															
2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN																			
				DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																
				Variabel Papan/Hunian dihitung dari beberapa indikator, yaitu:																			
				<table><tr><td>No.</td><td>Indikator</td><td>Item</td><td>Sumber Data</td></tr><tr><td>1.</td><td>Rumah Layak Huni</td><td>Kualitas dan kepemilikan hunian</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sanitasi Layak</td><td>Akses dan kualitas sanitasi</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>3.</td><td>Air Minum Layak</td><td>Kualitas dan sumber air minum</td><td>DTSEN</td></tr></table>				No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Rumah Layak Huni	Kualitas dan kepemilikan hunian	DTSEN	2.	Sanitasi Layak	Akses dan kualitas sanitasi	DTSEN	3.	Air Minum Layak	Kualitas dan sumber air minum	DTSEN
				No.	Indikator	Item	Sumber Data																
				1.	Rumah Layak Huni	Kualitas dan kepemilikan hunian	DTSEN																
				2.	Sanitasi Layak	Akses dan kualitas sanitasi	DTSEN																
				3.	Air Minum Layak	Kualitas dan sumber air minum	DTSEN																
				Variabel Kesehatan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:																			
				<table><tr><td>No.</td><td>Indikator</td><td>Item</td><td>Sumber Data</td></tr><tr><td>1.</td><td>Derajat Kesehatan</td><td>Stunting dan keluhan kesehatan kronis</td><td>BPS & DTSEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Akses Layanan Kesehatan</td><td>Akses terhadap layanan kesehatan</td><td>Podes</td></tr></table>				No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Derajat Kesehatan	Stunting dan keluhan kesehatan kronis	BPS & DTSEN	2.	Akses Layanan Kesehatan	Akses terhadap layanan kesehatan	Podes				
				No.	Indikator	Item	Sumber Data																
				1.	Derajat Kesehatan	Stunting dan keluhan kesehatan kronis	BPS & DTSEN																
				2.	Akses Layanan Kesehatan	Akses terhadap layanan kesehatan	Podes																
				Variabel Pendidikan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:																			
				<table><tr><td>No.</td><td>Indikator</td><td>Item</td><td>Sumber Data</td></tr><tr><td>1.</td><td>Bantuan Pendidikan</td><td>Program bantuan pendidikan</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Jenjang Pendidikan</td><td>Eksisting jenjang pendidikan masyarakat</td><td>DTSEN</td></tr></table>				No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN	2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN				
				No.	Indikator	Item	Sumber Data																
				1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN																
2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN																				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Variabel Jaminan Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu:			
				No.	Indikator	Item	Sumber Data
				1.	Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	DTSEN & Data dari Kab/Kota
				2.	Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)	DTSEN & Pusdatin
				Variabel <i>Physical Mobility</i> dihitung dari beberapa indikator, yaitu:			
				No.	Indikator	Item	Sumber Data
				1.	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum	Data dari Kab/Kota
				2.	Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas	Data dari Kab/Kota
				3.	Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri	Kemampuan untuk mobilitas	DTSEN
				4.	Akses ke Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Akses terhadap layanan rehabilitasi	Data dari Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Variabel Rasa Aman dihitung dari indikator, yaitu:			
				No.	Indikator	Item	Sumber Data
				1.	Keamanan Lingkungan	Perasaan aman pada lingkungan sosial bermasyarakat	DTSN & BPS
Sasaran 2: Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	2.1	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Angka	Dimensi Peranan Sosial: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. (n) merupakan jumlah banyak Variabel. Dimensi Peranan Sosial dibangun dari beberapa Kumpulan variabel (partisipasi, kohesi sosial, kelembagaan inklusif).		$\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$	Dinas Sosial Kabupaten Magetan
				Variabel Partisipasi dihitung dari beberapa indikator, yaitu:			
				No.	Indikator	Item	Sumber Data
				1.	Keikutsertaan	Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota
						Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan	Data dari Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN									
				DEFINISI OPERASIONAL				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA			
						pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP)							
				2.	Keputusan	Terdapat kelompok rentan yang memberikan saran/ masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota						
						Jumlah keterwakilan kelompok rentan yang memberikan saran/masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota						
				3.	Kontrol	Terdapat kelompok/organisasi rentan di Kabupaten/Kota	Data dari Kab/Kota						
						Masyarakat rentan yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Data dari Kab/Kota						
				Variabel Kohesi Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu:									
				No.	Indikator	Item	Sumber Data						
				1.	Relasi Sosial	Masyarakat rentan	Data dari						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN						
				DEFINISI OPERASIONAL				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA
						yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Kab/Kota			
						Keberadaan anggota keluarga	DTSEN			
				2.	Keterhubungan	Kejadian kekerasan/bullying terhadap masyarakat rentan	Data dari Kab/Kota			
						Masyarakat rentan terlanjar yang mendapat rehabilitasi sosial diluar panti	SPM Sosial			
				3.	Kepatuhan Sosial	Perilaku kriminalitas dalam setahun	Data dari Kab/Kota			
				4.	Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni	BPS			
						Indeks Ketimpangan Gender	BPS			
						Sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Data dari Kab/Kota			
						Sekolah non-SLB yang memiliki siswa disabilitas	Data dari Kab/Kota			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN							
				DEFINISI OPERASIONAL			FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
						Masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Data dari Kab/Kota				
				5.	Kualitas Hidup	Rata-rata jam kerja	DTSEN				
						Masyarakat yang mengakses layanan poli jiwa/ psikiater (depresi, stress, kecemasan)	Data dari Kab/Kota				
				Variabel Kelembagaan Inklusif dihitung dari beberapa indikator, yaitu:							
				No.	Indikator	Item	Sumber Data				
				1.	Kepastian Hukum	Nilai kepercayaan publik	Penilaian SPI KPK				
				2.	Kebijakan Inklusif	Kebijakan (Perda/Perbup) mengatur	Data dari Kab/Kota				
				3.	Insentif Ekonomi	Persaingan usaha	KPPU, LKPP, IDI				
						Tata kelola pengadaan	LKPP				
				Sasaran 3: Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan	3.1	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Angka		Dimensi Keberdayaan Ekonomi: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. (n) merupakan jumlah banyak Variabel. Dimensi Peranan Sosial dibangun dari beberapa Kumpulan variabel		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN																																								
				DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																																					
Rentan				(partisipasi dalam aktivitas ekonomi, utilitas / daya guna, ketahanan ekonomi) Variabel Partisipasi dalam aktivitas ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Sensus/ Proyeksi Penduduk</td></tr><tr><td>2.</td><td>PDRB ADHB</td><td>Nilai PDRB ADHB</td><td>BPS</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>BPS</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>BPS</td></tr><tr><td>5.</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>BPS</td></tr></table> Variabel Utilitas/Daya Guna dihitung dari indikator, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Sumber Penghasilan</td><td>Kepemilikan pekerjaan tetap</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>Kepemilikan pekerjaan paruh waktu</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>Kepemilikan</td><td>DTSEN</td></tr></table>		No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk	2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS	3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS	4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS	5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS	No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Sumber Penghasilan	Kepemilikan pekerjaan tetap	DTSEN	Kepemilikan pekerjaan paruh waktu	DTSEN	Kepemilikan	DTSEN			
No.	Indikator	Item	Sumber Data																																									
1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk																																									
2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS																																									
3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS																																									
4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS																																									
5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS																																									
No.	Indikator	Item	Sumber Data																																									
1.	Sumber Penghasilan	Kepemilikan pekerjaan tetap	DTSEN																																									
		Kepemilikan pekerjaan paruh waktu	DTSEN																																									
		Kepemilikan	DTSEN																																									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN				
				DEFINISI OPERASIONAL			FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						usaha sendiri		
				Variabel Ketahanan ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu:				
				No.	Indikator	Item	Sumber Data	
				1.	Diversifikasi penghasilan	Kepemilikan izin usaha	DTSEN	
				2.	Akses terhadap kredit usaha	Kepemilikan kredit usaha	DTSEN	
						Kepemilikan kredit perorangan	DTSEN	
				3.	Kepemilikan aset	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal	DTSEN	
						Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal	DTSEN	
						Omzet usaha	DTSEN	
						Aset bergerak	DTSEN	
						Aset tidak bergerak	DTSEN	
						Kepemilikan ternak	DTSEN	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	4.1	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakannya Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	%	Perbandingan Jumlah Pilar Sosial / PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai pedoman pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial tahun (n). Pilar Sosial / Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya.	Jumlah Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman ----- x 100% Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	5.1	Nilai SAKIP	Nilai	Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan	(30% x Nilai Perencanaan) + (30% x Nilai Pengukuran) + (15% x Nilai Pelaporan) + (25% x Nilai Evaluasi)	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjutt LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan		
	5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	9 Unsur/parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter	Laporan Hasil IKM Dinas Sosial

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025-2029

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS		Persentase PPKS yang Meningkatkan Derajat Kesejahteraannya	Persen	100
		1.1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	99,89
		1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	0,29
		1.3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persen	0,05
		1.4. Meningkatkan Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	5,40
		1.5. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	89
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,50

Sumber: Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial:

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025
Dinas Sosial
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	angka	84.5	4,435,821,960
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	54	37,367,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	18,492,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	47	18,875,000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	persen	90	3,390,198,779
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	25	3,362,823,779

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	12	27,375,000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	12	192,213,144
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	8,500,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	37,478,050
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	21,063,644
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	29,671,450
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	8,000,000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	7,500,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	80,000,000
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	36	661,793,037
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	100,000,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	19,250,000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	542,543,037
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	unit	9	154,250,000
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	50,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	70,000,000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	24,250,000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	10,000,000
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	persen	100	5,829,029,800
26	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	persen	100	5,829,029,800
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	57,684,000
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	18	94,438,700

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
29	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	40	99,500,000
30	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	170	5,577,407,100
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	persen	100	1,851,459,590
32	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	persen	100	1,814,371,940
33	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	275	1,364,968,990
34	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	50	50,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
35	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	97,000,000
36	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	41,450,800
37	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	45,189,050
38	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	75	148,390,000
39	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	34,460,700
40	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	32,912,400

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
41	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	persen	100	37,087,650
42	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	37,087,650
43	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	100	3,803,046,650
44	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	persen	100	3,803,046,650
45	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	1000	137,440,000
46	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	2050	3,665,606,650

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	persen	100	110,343,150
48	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	orang	100	71,039,500
49	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	27,125,000
50	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	43,914,500
51	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	kali	10	39,303,650
52	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	39,303,650

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
53	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	persen	100	100,000,000
54	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	persen	100	100,000,000
55	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam	1	90,000,000
56	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	7	10,000,000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	99,89
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	0,29
3.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	3.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Persen	0,05
4.	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4.1	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	5,4
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Sosial	5.1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	92,34
		5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,50

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	64,95
		1.1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Angka	58,83
		1.2	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Angka	76,87
		1.3	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Angka	60,09
		1.4	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	%	31,31
		1.5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Skor	92,34
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Skor	87,5

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial:

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Dinas Sosial
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	angka	84.5	4,144,250,014
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	54	26,043,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	13,194,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	47	12,849,000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	persen	90	3,181,242,677

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	312	3,160,086,677
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	12	21,156,000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	12	208,852,125
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	8,500,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	94,620,300
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	8	21,063,644
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	31,166,788
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	7,501,393

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	7,500,000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	38,500,000
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	36	574,172,212
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	92,669,212
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	19,080,000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	462,423,000
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	unit	9	153,940,000
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	50,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	70,000,000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	24,000,000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	9,940,000
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	persen	100	5,984,036,325
26	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	persen	100	5,984,036,325
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	-
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	18	87,334,200

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
29	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	40	98,492,275
30	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	195	5,798,209,850
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	persen	100	2,252,960,990
32	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	persen	100	2,223,860,790
33	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	375	1,485,162,640
34	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	50	50,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
35	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	122	429,250,000
36	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	43,438,700
37	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	41,189,050
38	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	117,947,300
39	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	29,210,700
40	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	27,662,400

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
41	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	persen	100	29,100,200
42	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	29,100,200
43	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	100	3,888,465,600
44	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	persen	100	3,888,465,600
45	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	114038	128,944,550
46	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	5000	3,759,521,050

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	persen	100	134,843,150
48	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	orang	100	71,039,500
49	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	27,125,000
50	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	43,914,500
51	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	kali	10	63,803,650
52	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	63,803,650

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
53	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	persen	100	97,655,100
54	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	persen	100	97,655,100
55	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam	1	88,555,100
56	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	7	9,100,000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Pada tanggal 3 (tiga) bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT.	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	1.1	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Angka	58,83
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	2.1	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Angka	76,87
3.	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	3.1	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Angka	60,09
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	4.1	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	%	31,31
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	5.1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Skor	92,34
		5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Skor	87,5

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025

Beberapa perubahan kebijakan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah :

1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Kinerja beserta indikator dan target yang disesuaikan dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029;
2. Perubahan Anggaran dikarenakan efisiensi dan perubahan prioritas program dan kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial maupun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk) tahun 2025
Dinas Sosial
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	99,89 Persen	99,89 Persen	100	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,29 Persen	0,29 Persen	100	Berhasil
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,05 Persen	0,05 Persen	100	Berhasil
Meningkatnya peran PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,40 Persen	5,24 Persen	97,04	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34	93,31	101,05	Sangat Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,5	87,61	100,13	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Sosial
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,83	64,62	110,40	Sangat Berhasil
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,87	65,80	85,60	Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,09	63,43	105,56	Sangat Berhasil
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	31,31	30,58	97,67	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34	93,31	101,05	Sangat Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,5	87,61	100,13	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Sosial
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan						
	▪ Indikator Kinerja SS Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	4.023.308.750	3.467.766.357	86,19	58,83	64,62	110,40
	▪ Program (1.1.) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial						
	▪ Sasaran Program (1.1.) Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	▪ Indikator Kinerja Program Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93	100%	98,03%	98,03
	▪ Kegiatan (1.1.1.) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	▪ Sasaran Kegiatan (1.1.1.) Terlaksananya Pengentasan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93	100%	98,03%	98,03

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Rincian Output (RO) 1.1.1.1. Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	128.944.550	99.687.090	77,31	114038 Orang	114038 Orang	100
	Rincian Output (RO) 1.1.1.2. Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.759.521.050	3.241.837.287	86,23	5000 Keluarga	4803 Keluarga	96,06
	▪ Program (1.2.) Program Penanganan Bencana						
	▪ Sasaran Program (1.2.) Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana						
	▪ Indikator Kinerja Program Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	134.843.150	126.241.980	93,62	100%	100%	100
	▪ Kegiatan (1.2.1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
	▪ Sasaran Kegiatan (1.2.1.) Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	71.039.500	63.720.230	89,70	100 Orang	100 Orang	100
	Rincian Output (RO) 1.2.1.1. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan	27.125.000	26.831.000	98,92	100 Orang	100 Orang	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Rincian Output (RO) 1.2.1.2. Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43.914.500	36.889.230	84,00	50 Orang	50 Orang	100
	▪ Kegiatan (1.2.2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						
	▪ Sasaran Kegiatan (1.2.2.) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	63.803.650	62.521.750	97,99	10 Kali	10 Kali	100
	Rincian Output (RO) 1.2.2.1. Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	63.803.650	62.521.750	97,99	45 Orang	45 Orang	100
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis						
	▪ Indikator Kinerja SS	2.252.960.990	2.025.311.890	89,90	76,87	65,80	85,60

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Nilai Dimensi Peranan Sosial						
	▪ Program (2.1.) Program Rehabilitasi Sosial						
	▪ Sasaran Program (2.1.) Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						
	▪ Indikator Kinerja Program Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	2.252.960.990	2.025.311.890	89,90	100%	100%	100
	▪ Kegiatan (2.1.1.) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
	▪ Sasaran Kegiatan (2.1.1.) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Prioritas						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	2.223.860.790	1.996.891.940	89,79	100%	100%	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.1. Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.485.162.640	1.381.386.340	93,01	375 Orang	375 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.2. Terpenuhinya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	48.532.850	97,07	50 Orang	50 Orang	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Rincian Output (RO) 2.1.1.3. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	429.250.000	321.998.050	75,01	122 Orang	122 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.4. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	43.438.700	42.713.100	98,33	25 Orang	25 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.5. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	41.189.050	40.711.500	98,84	25 Orang	25 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.6. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117.947.300	106.656.400	90,43	100 Orang	100 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.7. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	29.210.700	28.403.500	97,24	20 Orang	20 Orang	100
	Rincian Output (RO) 2.1.1.8. Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.662.400	26.490.200	95,76	20 Orang	20 Orang	100
	▪ Kegiatan (2.2.1.) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
	Sasaran Kegiatan (2.2.1.) (<i>output</i>) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	29.100.200	28.419.950	97,66	100%	100%	100
	Rincian Output (RO) 2.2.1.1. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	29.100.200	28.419.950	97,66	20 Orang	20 Orang	100
3.	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan						
	Indikator Kinerja SS Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	98.492.275	87.569.742	88,91	60,09	63,43	105,56
	Program (3.1.) Program Pemberdayaan Sosial						
	Sasaran Program (3.1.) Meningkatnya Pemberdayaan Sosial						
	Indikator Kinerja Program Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	100%	94,81%	94,81

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kegiatan (3.1.1.) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan (3.1.1.) Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	100%	94,81%	94,81
	Rincian Output (RO) 3.1.1.1. Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	98.492.275	87.569.742	88,91	40 Orang	35 Orang	87,50
4.	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial						
	Indikator Kinerja SS Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	5.885.544.050	5.623.079.575	95,54	31,31	30,58	97,67
	Program (4.1.) Program Pemberdayaan Sosial						
	Sasaran Program (4.1.) Meningkatnya Pemberdayaan Sosial						
	Indikator Kinerja Program Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	100%	94,81%	94,81
	Kegiatan (4.1.1.) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan (4.1.1.) Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	100%	94,81%	94,81
	Rincian Output (RO) 4.1.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.334.200	84.875.700	97,18	18 Orang	18 Orang	100
	Rincian Output (RO) 4.1.1.2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5.798.209.850	5.538.203.875	95,52	195 Lembaga	189 Lembaga	96,92
5.	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial						
	Indikator Kinerja SS 1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	47.199.000	46.646.300	98,83	92,34	93,31	101,05
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	4.194.706.114	3.949.058.140	94,14	87,5	87,61	100,13
	Program (5.1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Sasaran Program (5.1.) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial						
	Indikator Kinerja Program Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	4.144.250.014	3.903.579.849	94,19	84,5	84,5	100
	Kegiatan (5.1.1.) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sasaran Kegiatan (5.1.1.) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	26.043.000	25.730.300	98,80	54 Dokumen	54 Dokumen	100
	Rincian Output (RO) 5.1.1.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.194.000	13.109.300	99,36	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Rincian Output (RO) 5.1.1.2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.849.000	12.621.000	98,23	47 Laporan	47 Laporan	100
	Kegiatan (5.1.2.) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Sasaran Kegiatan (5.1.2.) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	3.181.242.677	3.020.226.081	94,94	90%	92,11%	102,34
	Rincian Output (RO) 5.1.2.1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.160.086.677	2.999.310.081	94,91	312 Orang /bulan	312 Orang /bulan	100
	Rincian Output (RO) 5.1.2.2. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.156.000	20.916.000	98,87	12 Laporan	12 Laporan	100
	▪ Kegiatan (5.1.3.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	▪ Sasaran Kegiatan (5.1.3.) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.852.125	187.576.204	89,81	12 Paket	12 Paket	100
	Rincian Output (RO) 5.1.3.1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000	7.009.095	82,46	6 Paket	6 Paket	100
	Rincian Output (RO) 5.1.3.2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.620.300	83.391.087	88,13	12 Paket	11 Paket	91,67
	Rincian Output (RO) 5.1.3.3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	21.063.644	16.954.921	80,49	8 Paket	8 Paket	100
	Rincian Output (RO) 5.1.3.4.	31.166.788	27.638.000	88,68	12 Paket	12 Paket	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor						
	Rincian Output (RO) 5.1.3.5. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.501.393	7.189.000	95,84	6 Paket	6 Paket	100
	Rincian Output (RO) 5.1.3.6. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	6.895.000	91,93	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Rincian Output (RO) 5.1.3.7. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.500.000	38.499.101	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan (5.1.4.) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sasaran Kegiatan (5.1.4.) Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.172.212	528.392.459	92.03	36 Laporan	36 Laporan	100
	Rincian Output (RO) 5.1.4.1. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.669.212	70.761.559	76,36	12 Laporan	12 Laporan	100
	Rincian Output (RO) 5.1.4.2 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.080.000	12.682.900	66,47	12 Laporan	12 Laporan	100
	Rincian Output (RO) 5.1.4.3 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	462.423.000	444.948.000	96,22	12 Laporan	12 Laporan	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kegiatan (5.1.5.) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sasaran Kegiatan (5.1.5.) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	153.940.000	141.654.805	92,02	9 Unit	9 Unit	100
	Rincian Output (RO) 5.1.5.1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	42.761.998	85,52	1 Unit	1 Unit	100
	Rincian Output (RO) 5.1.5.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	68.530.272	97,90	6 Unit	6 Unit	100
	Rincian Output (RO) 5.1.5.3 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	20.997.535	87,49	1 Unit	1 Unit	100
	Rincian Output (RO) 5.1.5.4 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.940.000	9.365.000	94,22	1 Unit	1 Unit	100
	Program (6.1.) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	▪ Sasaran Program (6.1.) Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan						
	▪ Indikator Kinerja Program Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	97.655.100	92.124.591	93,34	100%	100%	100
	▪ Kegiatan (6.1.1.) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
	▪ Sasaran Kegiatan (6.1.1.) Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	97.655.100	92.124.591	93,34	100%	100%	100
	Rincian Output (RO) 6.1.1.1. Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88.555.100	83.130.591	93,87	1 Makam	1 Makam	100
	Rincian Output (RO) 6.1.1.2 Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.100.000	8.994.000	98,84	7 Laporan	7 Laporan	100

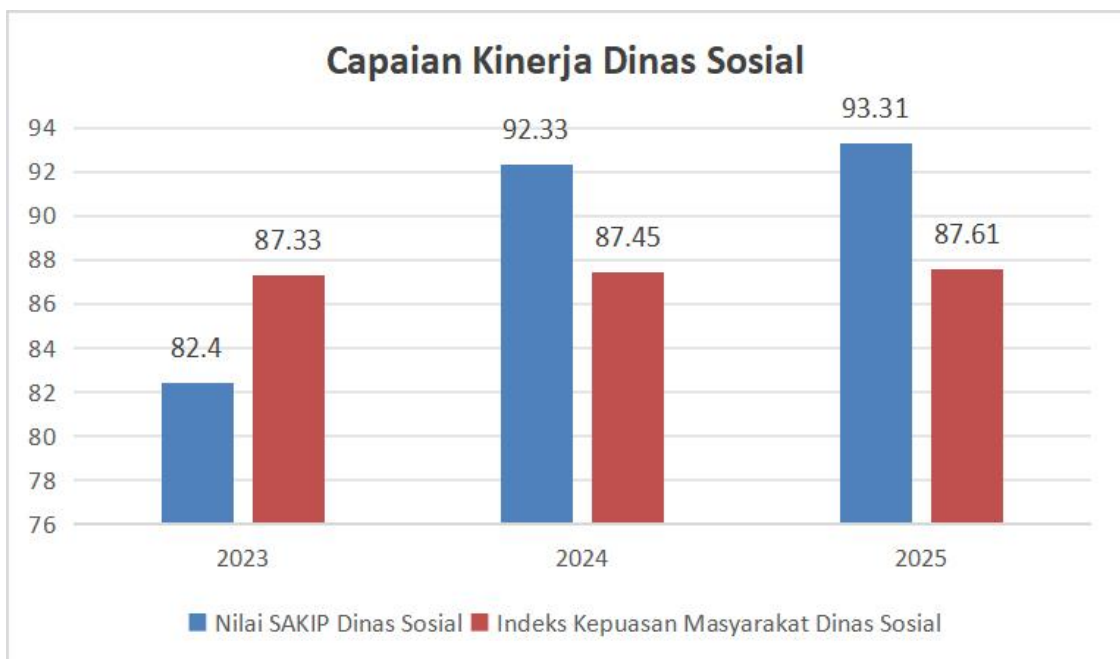
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	-	-	-	-	-	-	58,83	64,62	110,40
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	-	-	-	-	-	-	76,87	65,80	85,60
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	60,09	63,43	105,56
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	-	-	-	-	-	-	31,31	30,58	97,67
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	-	82,40	-	85	92,33	108,62	92,34	93,31	101,05
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	84	87,33	103,96	87,35	87,45	100,11	87,5	87,61	100,13

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja sasaran 1 sampai dengan indikator kinerja sasaran 4 belum ada realisasi pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sasaran 1 sampai dengan sasaran 4 merupakan sasaran baru yang dirumuskan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Perbandingan capaian kinerja tidak dapat disajikan pada tahun 2023 dan 2024 karena pada indikator kinerja sasaran 1 sampai dengan indikator sasaran 3 nilai realisasinya dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, sedangkan indikator kinerja sasaran 4 merupakan indikator baru yang perhitungannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial setiap tahunnya mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2023-2025



3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	64,62	58,87	109,77%
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	65,80	76,91	85,55%
3.	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	63,43	60,13	105,49%
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	30,58	31,35	97,54%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	93,31	93,35	99,96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,61	87,80	99,78%

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator nilai dimensi kebutuhan dasar serta sasaran Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator nilai dimensi keberdayaan ekonomi realisasinya sudah melebihi target akhir yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial. Pada sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator nilai dimensi kebutuhan dasar capaian kinerja tahun 2025 sebesar 109,77%, sehingga sudah

melebihi 9,77% dari target akhir Renstra Dinas Sosial, sedangkan pada sasaran Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator nilai dimensi keberdayaan ekonomi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 105,49%, sehingga sudah melebihi 5,49% dari target akhir Renstra Dinas Sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Pada Sasaran Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dengan indikator nilai dimensi peranan sosial realisasi tahun 2025 sebesar 65,80 sedangkan target akhir Renstra Dinas Sosial sebesar 76,91 dengan tingkat kemajuan 85,55%, sehingga kurang 14,45% untuk mencapai target akhir Renstra. Kemudian untuk sasaran Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman realisasi tahun 2025 sebesar 30,58% sedangkan target akhir Renstra Dinas Sosial sebesar 31,35% dengan tingkat kemajuan 97,54%. Meskipun masih di bawah 100% tingkat kemajuan untuk kedua indikator ini sudah cukup baik, dan diharapkan pada akhir periode Renstra capaian target tersebut dapat tercapai.

Untuk sasaran ke- 5 Dinas Sosial adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial dengan 2 indikator yaitu nilai SAKIP Dinas Sosial dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial. Indikator pertama, nilai SAKIP Dinas Sosial realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 93,31 sedangkan target akhir renstra 93,35 dengan tingkat kemajuan 99,96%, sehingga kurang 0,04% untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Sosial. Untuk indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 87,61 sedangkan target akhir renstra 87,80 dengan tingkat kemajuan 99,78%, sehingga kurang 0,22% untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Sosial. Meskipun masih di bawah 100% tingkat kemajuan untuk kedua indikator ini sudah cukup baik, dan diharapkan pada akhir periode Renstra capaian target tersebut dapat tercapai. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketertiban dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi kinerja.

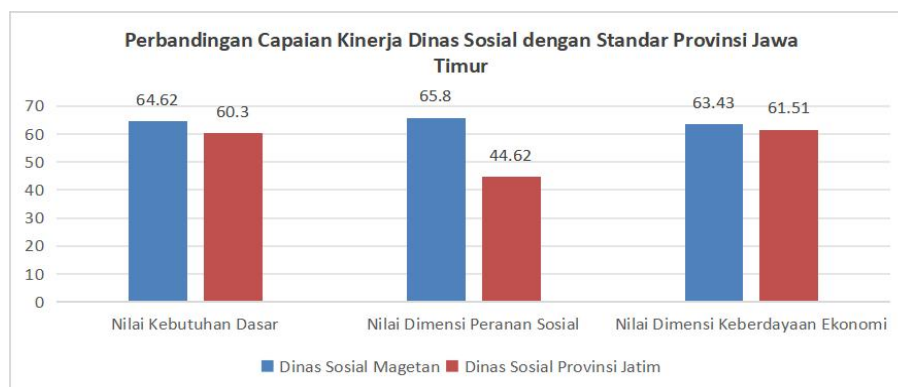
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Standar Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	64,62	60,30	107,16
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	65,80	44,62	147,47
3.	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	63,43	61,51	103,12

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga indikator yaitu Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar, Nilai Dimensi Peranan Sosial dan Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, perbandingan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial dengan Standar Provinsi Jawa Timur



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.8
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,83	64,62	110,40	- Adanya kolaborasi yang baik dengan pilar-pilar sosial, perangkat daerah terkait serta kolaborasi program dengan provinsi maupun pusat dalam pemberian fasilitasi jaminan kesehatan maupun dalam proses penyaluran bantuan sosial baik bantuan sosial bagi PPKS maupun bagi korban bencana.
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,87	65,80	85,60	- Populasi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang jumlahnya cukup besar, sehingga belum seluruhnya dapat terintervensi program; - Adanya bantuan sosial Bunda Kasih yang tidak terealisasi seluruhnya karena penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah domisili, double bansos dan double entry yang belum ada penggantinya saat proses pencairan pada perubahan anggaran.
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,09	63,43	105,56	- Intervensi Dinas Sosial dalam peningkatan keberdayaan ekonomi adalah melalui bantuan permodalan bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi); - Adanya kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait dan Provinsi dalam peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.
Meningkatnya Profesionalisme	Persentase Pilar Sosial yang	31,31	30,58	97,67	- Adanya peningkatan kompetensi dasar bagi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
SDM Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman				PSKS; - Pemberian bantuan hibah bagi lembaga kesejahteraan sosial; - Tidak tercapainya kinerja dikarenakan tidak adanya pelaksanaan rapat koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Intervensi program yang dilaksanakan yakni pemberian bantuan permakanaan bagi LKSA, namun dari target 22 LKSA hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal.
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34	93,31	101,05	- Adanya kerjasama yang baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam memenuhi rekomendasi Tim Evaluator SAKIP tahun sebelumnya; - Adanya peningkatan ketertiban dalam pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,5	87,61	100,13	- Ketersediaan informasi terkait pelayanan Dinas Sosial secara offline di kantor dan yang bisa diakses melalui online pada website, instagram, facebook maupun WA center Dinas Sosial; - Kemudahan dalam mengakses pelayanan online seperti Penerbitan Surat Keterangan DTSEN secara online; - Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan Dinas Sosial (kursi tunggu yang nyaman, televisi, air minum, snack bagi anak-anak, ruang bermain,

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
					ruang laktasi dan jalur khusus disabilitas); - Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan.

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang diperjanjikan tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2025 dari 5 sasaran Dinas Sosial, terdapat 3 sasaran mencapai target yang telah ditentukan dan 2 sasaran belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Hasil analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dicantumkan dalam tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
 - a. Adanya kolaborasi yang baik antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan fasilitasi jaminan kesehatan baik PBI-D (Peserta Bantuan Iuran Daerah) maupun bantuan sosial insidentil;
 - b. Adanya kolaborasi dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam memberikan fasilitasi jaminan kesehatan bagi PPKS (PBI-JKN dan Biakesmaskin provinsi);
 - c. Adanya kolaborasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial sembako bagi PPKS dan korban bencana;
 - d. Adanya kolaborasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya;
2. Kegagalan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dipengaruhi oleh Populasi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang jumlahnya cukup besar, sehingga belum seluruhnya dapat terintervensi program serta adanya bantuan sosial Bunda Kasih yang tidak terealisasi seluruhnya karena penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah domisili,

double bansos dan double entry yang belum ada penggantinya saat proses pencairan pada perubahan anggaran. Namun meskipun target tidak tercapai, presentase capaian kinerja Dinas Sosial masih masuk dalam kategori berhasil dengan nilai capaian 85,60%. Keberhasilan tersebut tentunya didukung pula oleh beberapa faktor diantaranya adanya inovasi Dinas Sosial dalam Satgas Pintar (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran) yang berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah terkait dalam menangani masalah ketelantaran di Kabupaten Magetan, adanya layanan Trengginas (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial) yang mempercepat dan mempermudah dalam koordinasi penanganan rehabilitasi PPKS, adanya layanan rumah terapi bagi disabilitas CP, adanya layanan shelter lansia terlantar serta adanya kolaborasi yang baik dengan dinas sosial provinsi, balai besar kementerian dan juga pendamping sosial.

3. Keberhasilan dalam mencapai sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya intervensi Dinas Sosial dalam peningkatan keberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), serta adanya kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait dan juga Provinsi dalam peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Kegagalan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dikarenakan tidak adanya pelaksanaan rapat koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Intervensi program yang dilaksanakan yakni pemberian bantuan permakanan bagi LKSA, namun dari target 22 LKSA hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal. Namun meskipun target tidak tercapai, presentase capaian kinerja Dinas Sosial masih masuk dalam kategori berhasil dengan nilai capaian 97,67%. Keberhasilan ini didukung oleh adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dasar bagi PSKS.
5. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja indikator nilai SAKIP Dinas Sosial pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial didukung oleh beberapa faktor, seperti :
 - a. Adanya kerjasama yang baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam memenuhi rekomendasi Tim Evaluator SAKIP tahun sebelumnya;

- b. Adanya peningkatan ketertiban dalam pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial didukung oleh beberapa faktor, seperti :

- a. Ketersediaan informasi terkait pelayanan Dinas Sosial secara offline di kantor dan yang bisa diakses melalui online pada website, instagram, facebook maupun WA center Dinas Sosial;
- b. Kemudahan dalam mengakses pelayanan online seperti Penerbitan Surat Keterangan DTSEN secara online;
- c. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan Dinas Sosial dengan disediakannya kursi tunggu yang nyaman, televisi, air minum, snack bagi anak-anak, ruang bermain, ruang laktasi dan jalur khusus disabilitas;
- d. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan.

Meskipun mayoritas target kinerja telah tercapai dengan kategori berhasil dan sangat berhasil, namun dalam pencapaiannya tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan membutuhkan alternatif penyelesaian. Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Database calon penerima bansos yang belum valid	Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring updating data dengan desa/kelurahan.
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Kurang validnya data calon penerima	Melaksanakan verifikasi dan validasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis		manfaat; • Dinamisasi data PPKS (PPKS meninggal, pindah domisili dll); • Kurangnya keterampilan SDM pengelola layanan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan peranan sosial PPKS.	data serta assessment terintegrasi; • Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	• Dinamisasi data PPKS (PPKS pindah domisili); • Database PPKS yang belum valid.	• Melaksanakan verifikasi dan validasi data serta assessment terintegrasi; • Melaksanakan updating data secara berkala.
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	PSKS yang kurang cakap dalam penanganan kesejahteraan sosial.	• Mengadakan bimbingan teknis bagi pendamping sosial; • Pemberian rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial dan fasilitasi sertifikasi bagi pendamping sosial.
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	ASN yang kurang memahami tusi.	Peningkatan kapasitas bagi ASN.

Berdasarkan tabel 3.9 di atas permasalahan yang sering muncul dalam upaya pencapaian target sasaran adalah dinamisasi data dan data PPKS yang belum valid. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial telah berupaya untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta assessment terintegrasi dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial serta diadakan monitoring dan evaluasi data dengan desa/kelurahan. Namun dalam perjalanannya, dinamisasi data terutama ketika PPKS meninggal dunia atau berpindah domisili sulit untuk dikendalikan sehingga bantuan sosial tidak tersalurkan atau bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Selain permasalahan data, dalam pencapaian sasaran kedua Meningkatkan Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan sasaran keempat Meningkatkan Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial terdapat pula permasalahan terkait kurangnya keterampilan dan kecakapan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial mengadakan peningkatan kapasitas bagi SDM pendamping sosial dengan study tiru, mengadakan bimbingan teknis dan memberikan rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial serta fasilitasi sertifikasi bagi pendamping sosial.

Dalam pencapaian sasaran ke lima Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dalam mengatasi hal tersebut Dinas Sosial berupaya untuk mengadakan peningkatan kapasitas bagi ASN.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretariat	4.144.250.014	3.903.579.849	94,19
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	26.043.000	25.730.300	98,80
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	3.181.242.677	3.020.226.081	94,94
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	208.852.125	187.576.204	89,81

1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	574.172.212	528.392.459	92,03
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	153.940.000	141.654.805	92,02
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bidang Pemberdayaan Sosial	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Pemberdayaan Sosial	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.252.960.990	2.025.311.890	89,90
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.223.860.790	1.996.891.940	89,79
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	29.100.200	28.419.950	97,66
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	134.843.150	126.241.980	93,62
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	71.039.500	63.720.230	89,70
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan	Bidang Perlindungan	63.803.650	62.521.750	97,99

	Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	dan Jaminan Sosial			
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Bidang Pemberdayaan Sosial	97.655.100	92.124.591	94,34
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Sosial	97.655.100	92.124.591	94,34
TOTAL			16.502.211.179	15.199.432.004	92,11

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, Program dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pemberdayaan Sosial yakni sebesar 95,43% dan Program dengan realisasi anggaran terendah adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yakni sebesar 85,93%. Sedangkan Kegiatan dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yakni sebesar 98,80% dan Kegiatan dengan realisasi anggaran terendah adalah Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yakni sebesar 85,93%.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,83	64,62	110,40	4.023.308.750	3.467.766.357	86,19%	21,93%
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas,	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,87	65,80	85,60	2.252.960.990	2.025.311.890	89,90%	-5,02%

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis								
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,09	63,43	105,56	98.492.275	87.569.742	88,91%	15,77%
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	31,31 %	30,58 %	97,67	5.885.544.050	5.623.079.575	95,54%	2,18%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34	93,31	101,05	47.199.000	46.646.300	98,83%	2,20%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,5	87,61	100,13	4.194.706.114	3.949.058.140	94,14%	5,98%
Efisiensi Total								7,72%

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh program/kegiatan yang mendukung sasaran sudah mencapai efisiensi. Efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dimana dari 5 sasaran yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Magetan, 4 sasaran dengan 5 indikator capaian kinerjanya lebih tinggi dari penggunaan anggarannya, sedangkan ada 1 (satu) sasaran yang didukung oleh 1 (satu) program yang belum mencapai efisiensi karena indikator merupakan indikator baru, dengan realisasi kinerja yang menghitung adalah dari Kementerian Sosial dengan dipadukan dari beberapa program/kegiatan dari perangkat daerah terkait. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 21,93% ada pada sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran Meningkatkan Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dengan indikator Nilai Dimensi Peranan Sosial sebesar -5,02% (belum mencapai efisiensi).

Selain perbandingan capaian kinerja, anggaran dan sasaran, berikut juga disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran program serta kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja 6 program dan 12 kegiatan Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	84.5 Angka	84.5 Angka	100%	4.144.250.014	3.903.579.849	94,19	5.81%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	26.043.000	25.730.300	98,80	1.20%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	92,11 Persen	102,34%	3.181.242.677	3.020.226.081	94,94	7.23%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	100%	208.852.125	187.576.204	89,81	10.19%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	36 Laporan	100%	574.172.212	528.392.459	92,03	7.97%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	9 Unit	100%	153.940.000	141.654.805	92,02	7.98%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 Persen	94,81 Persen	94,81%	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	-0.66%
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	94,81 Persen	94,81%	5.984.036.325	5.710.649.317	95,43	-0.66%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100%	2.252.960.990	2.025.311.890	89,90	10.10%
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	100 Persen	100 Persen	100%	2.223.860.790	1.996.891.940	89,79	10.21%

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	100%	29.100.200	28.419.950	97,66	2.34%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	98,03 Persen	98,03%	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93	12.34%
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	98,03 Persen	98,03%	3.888.465.600	3.341.524.377	85,93	12.34%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	100%	134.843.150	126.241.980	93,62	6.38%
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%	71.039.500	63.720.230	89,70	10.30%
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kali	10 Kali	100%	63.803.650	62.521.750	97,99	2.01%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 Persen	100 Persen	100%	97.655.100	92.124.591	94,34	5.66%
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100%	97.655.100	92.124.591	94,34	5.66%
	RATA-RATA EFISIENSI							4,85%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan juga target indikator pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan tabel 3.12 diatas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh program sudah mencapai target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan. Efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dimana efisiensi tertinggi terdapat pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 12,34% dan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,34%. Sedangkan program dan kegiatan dengan tingkat efisiensi paling rendah sebesar -0,66%

(belum mencapai efisiensi) adalah pada Program Pemberdayaan Sosial dan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.

D. INOVASI TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan antara lain:

1. SATGAS PINTAR (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran)

Satuan tugas yang dibentuk untuk menanggulangi ketelantaran terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan/Anak Terlantar dan Orang Terlantar di Kabupaten Magetan dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait.

Gambar 3.3
Kegiatan Satgas Pintar (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran)



2. TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial)

TRENGGINAS dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Kegiatan homecare dan pembuatan WA Center yang memudahkan dalam penanganan respon kasus dan pengaktifan media sosial lainnya.

Gambar 3.4
Kegiatan TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial)



3. RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA

Rumah terapi yang memberikan layanan gratis bagi penyandang disabilitas CP (Celebral Palsy) yang menyediakan layanan fisioterapi, okupasi dan terapi wicara.

Gambar 3.5
Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa



4. GERILIA (GERAKAN RUKUN TETANGGA PEDULI LANSIA)

GERILIA adalah Gerakan RT Peduli Lansia dalam bentuk aktivitas pelayanan dan Penanganan Komprehensif Lansia Terlantar di Magetan. GERILIA adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan lansia secara

umum dan khususnya untuk lansia terlantar di Kabupaten Magetan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Gambar 3.6
Gerilia (Gerakan Rukun Tetangga Peduli Lansia)



5. SHELTER RUMAH LANSIA “MULIA”

Shelter yang memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Magetan.

Gambar 3.7
Shelter Rumah Lansia “Mulia”



E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Sosial antara lain:

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Dinas dengan Predikat Pelayanan Prima (A) dari Bupati Magetan.

Gambar 3.8
Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik Kategori Dinas



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan

- Sasaran ke-1 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 110,40% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 98,03% (kategori berhasil) dan capaian indikator kedua sebesar 100% (kategori berhasil);

- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 98,03% (kategori berhasil), capaian kinerja indikator kedua sebesar 100% (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator ketiga sebesar 100% (kategori berhasil).

Sasaran 2: Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 85,60% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil);
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 100% (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator kedua sebesar 100% (kategori berhasil).

Sasaran 3: Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan

- Sasaran ke-3 Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105,56% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94,81 % (kategori berhasil);
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94,81% (kategori berhasil).

Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial

- Sasaran ke-4 Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,67% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-4 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94,81 % (kategori berhasil);

- Sasaran ke-4 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94,81% (kategori berhasil).

Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial

- Sasaran ke-5 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 101,05% (kategori sangat berhasil) dan capaian kinerja indikator kedua sebesar 100,13% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-5 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 100 % (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator kedua sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sasaran ke-5 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dimana 5 (lima) indikator memiliki capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil) dan 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,34% (kategori sangat berhasil).

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,83	64,62	110,40
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,87	65,80	85,60
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,09	63,43	105,56
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai	31,31%	30,58%	97,67

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Sosial	Pedoman			
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34	93,31	101,05
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,5	87,61	100,13
Capaian Kinerja				100,07
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100,07% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 15.199.432.004 (92,11%) dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 7,96%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 dari 99,54% menjadi 100,07%, dengan kenaikan sebesar 0,53%. Penyebab utama peningkatan tersebut adalah perubahan sasaran dan indikator kinerja yang diikuti dengan perubahan perhitungan atau formulasi perhitungan capaian kinerja serta adanya kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait, dinas sosial provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial dalam penanganan PPKS di Kabupaten Magetan.

Serapan anggaran tahun 2025 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 97,60% menjadi 92,11%, dengan penurunan sebesar 5,49%. Penyebab utama permasalahan ini adalah terdapat beberapa rincian belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan karena penerima manfaat yang meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan pencairan, tidak lagi berdomisili di Kabupaten Magetan, *double entry*, *double* bansos, dan beberapa rincian belanja hibah yang tidak realisasi karena tidak memenuhi persyaratan pencairan serta BLT yang tidak direalisasikan karena penerima manfaat resign, pindah ke luar kota, meninggal dunia, dan *double* bansos.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2026 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	a. Melaksanakan fasilitasi jaminan kesehatan PBI-JKN, PBI-D, Biaskes Maskin Provinsi dan Bantuan Sosial Insidentil; b. Melaksanakan pemberian bantuan sosial sembako bagi PPKS; c. Melaksanakan pemberian bantuan sosial sembako dan sarana prasarana bagi korban bencana; d. Melaksanakan fasilitasi layanan pendampingan bansos PKH dan BPNT dari pemerintah pusat; e. Melaksanakan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan PPKS lainnya.
Sasaran 2: Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	a. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dengan beberapa program diantaranya: • Bantuan sosial permakanan bunda kasih bagi lanjut usia terlantar; • Layanan shelter rumah lansia; • Fasilitasi penyaluran alat bantu; • Layanan reunifikasi keluarga; • Layanan penelusuran keluarga dan fasilitasi NIK; • Layanan rujukan. b. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi disabilitas terlantar dengan beberapa program diantaranya: • Bantuan sosial ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas); • Fasilitasi penyaluran alat bantu; • Pengiriman pelatihan kewirausahaan; • Layanan rujukan kesehatan; • Layanan penelusuran keluarga dan fasilitasi NIK; • Layanan reunifikasi keluarga; • Layanan rumah terapi bagi penyandang disabilitas CP (Cerebral Palsy); • Layanan sanggar kegiatan sosial.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
		c. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dengan beberapa program diantaranya: • Pengiriman pelatihan keterampilan; • Fasilitasi layanan adopsi anak; • Layanan penelusuran keluarga dan fasilitasi NIK; • Layanan reunifikasi keluarga. d. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan beberapa program diantaranya: • Layanan penelusuran keluarga; • Layanan reunifikasi keluarga; • Fasilitasi layanan kependudukan. e. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya selain korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan beberapa program diantaranya: • Layanan pendampingan bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum); • Layanan pendampingan bagi anak korban tindak kekerasan; • Layanan rumah singgah bagi PPKS.
Sasaran 3: Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi dari Provinsi maupun Kementerian.
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	a. Melaksanakan bimbingan teknis dasar bagi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat); b. Pembinaan bagi TKSK; c. Pembinaan bagi Karang Taruna Kabupaten; d. Melaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan bagi SDM lembaga sosial; e. Pemberian hibah kepada lembaga sosial; f. Fasilitasi rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
		g. Melaksanakan pembinaan bagi pendamping sosial lainnya.
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	a. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Mengembangkan kompetensi aparatur pemberi layanan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; c. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam pengadministrasian dan pemenuhan dokumen-dokumen terkait penilaian akuntabilitas kinerja; d. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing serta perannya terhadap akuntabilitas kinerja.

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	-	-	-	64,63	64,63
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	-	-	-	76,88	76,88
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	-	-	-	63,44	63,44

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
dan Rentan						
Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	-	-	-	31,32%	31,32%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	-	-	-	93,32	93,32
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	87,65	87,65

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002

LAMPIRAN

A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD

B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD

C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya

E. Pengukuran Kinerja

F. Pohon Kinerja

G. Rencana Aksi Tahun 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 -2026**

1.	Instansi	: DINAS SOSIAL
2.	Tugas	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
3.	Fungsi	: - perumusan kebijakan di bidang sosial; - pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; - pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$ Keterangan : Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan, pangan, papan dan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permenkos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$ Keterangan : Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$ Keterangan : Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pemberdayaan usaha termasuk PPKS yang terfasilitasi pelatihan pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4.	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berkontribusi Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan PSKS}}{\text{Jumlah Keseluruhan PSKS}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

		Keterangan : Perbandingan Jumlah PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PSKS tahun (n) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). PSKS terdiri dari TSKS, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya		
--	--	--	--	--

Magetan Juli 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Sosial
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang sosial; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB												
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Dimensi Kebutuhan Dasar: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi kebutuhan dasar dibangun dari beberapa kumpulan variabel (pangan, papan/hunian, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, <i>physical mobility</i>, rasa aman) Variabel Pangan dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ketahanan Pangan</td><td>Kecukupan pangan individu</td><td>DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kecukupan Gizi</td><td>Akses & kualitas konsumsi pangan</td><td>BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr></table>	No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)	2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
No	Indikator	Item	Sumber Data														
1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)														
2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)														

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Variabel Papan/Hunian dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Rumah Layak Huni	Kualitas dan kepemilikan hunian	DTSEN		
			2.	Sanitasi Layak	Akses dan kualitas sanitasi	DTSEN		
			3.	Air Minum Layak	Kualitas dan sumber air minum	DTSEN		
			Variabel Kesehatan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Derajat Kesehatan	Stunting dan keluhan kesehatan kronis	BPS & DTSEN		
			2.	Akses Layanan Kesehatan	Akses terhadap layanan kesehatan	Podes		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																								
			Variabel Pendidikan dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><td>No</td><td>Indikator</td><td>Item</td><td>Sumber Data</td></tr><tr><td>1.</td><td>Bantuan Pendidikan</td><td>Program bantuan pendidikan</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Jenjang Pendidikan</td><td>Eksisting jenjang pendidikan masyarakat</td><td>DTSEN</td></tr></table> Variabel Jaminan Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><td>No</td><td>Indikator</td><td>Item</td><td>Sumber Data</td></tr><tr><td>1.</td><td>Jaminan Sosial</td><td>Cakupan kepemilikan jaminan sosial</td><td>DTSEN & Data dari Kab/Kota</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bantuan Sosial</td><td>Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)</td><td>DTSEN & Pusdatin</td></tr></table>				No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN	2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN	No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	DTSEN & Data dari Kab/Kota	2.	Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)	DTSEN & Pusdatin		
No	Indikator	Item	Sumber Data																													
1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN																													
2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN																													
No	Indikator	Item	Sumber Data																													
1.	Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	DTSEN & Data dari Kab/Kota																													
2.	Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)	DTSEN & Pusdatin																													

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Variabel <i>Physical Mobility</i> dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum	Data dari Kab/Kota		
			2.	Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas	Data dari Kab/Kota		
			3.	Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri	Kemampuan untuk mobilitas	DTSEN		
			4.	Akses ke Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Akses terhadap layanan rehabilitasi	Data dari Kab/Kota		
			Variabel Rasa Aman dihitung dari indikator, yaitu:					
			No.	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Keamanan Lingkungan	Perasaan aman pada lingkungan	DTSEN & BPS		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB								
					sosial bermasyarakat											
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Dimensi Peranan Sosial: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi Peranan Sosial dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi, kohesi sosial, kelembagaan inklusif) Variabel Partisipasi dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Keikutsertaan</td><td>Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)</td><td>Data dari Kab/Kota</td></tr></table>				No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Keikutsertaan	Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
No	Indikator	Item	Sumber Data													
1.	Keikutsertaan	Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota													

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
			2.	Keputusan	Terdapat kelompok rentan yang memberikan saran/ masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
					Jumlah keterwakilan kelompok rentan yang memberikan saran/masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
			3.	Kontrol	Terdapat kelompok/organi	Data dari Kab/Kota		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB				
					sasi rentan di Kabupaten/Kota							
					Masyarakat rentan yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Data dari Kab/Kota						
			Variabel Kohesi Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu:									
			No	Indikator	Item	Sumber Data						
			1	Relasi Sosial	Masyarakat rentan yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Data dari Kab/Kota						
					Keberadaan anggota keluarga	DTSEN						
			2	Keterhubungan	Kejadian kekerasan/bullying terhadap masyarakat rentan	Data dari Kab/Kota						
					Masyarakat rentan terlantar yang mendapat	SPM Sosial						

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					rehabilitasi sosial diluar panti			
			3	Kepatuhan Sosial	Perilaku kriminalitas dalam setahun	Data dari Kab/Kota		
			4	Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni	BPS		
					Indeks Ketimpangan Gender	BPS		
					Sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Data dari Kab/Kota		
					Sekolah non-SLB yang memiliki siswa disabilitas	Data dari Kab/Kota		
					Masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Data dari Kab/Kota		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB					
			5 .	Kualitas Hidup	Rata-rata jam kerja	DTSEN							
					Masyarakat yang mengakses layanan poli jiwa/ psikiater (depresi, stress, kecemasan)	Data dari Kab/Kota							
			Variabel Kelembagaan Inklusif dihitung dari beberapa indikator, yaitu:										
			No.	Indikator	Item	Sumber Data							
			1.	Kepastian Hukum	Nilai kepercayaan publik	Penilaian SPI KPK							
			2.	Kebijakan Inklusif	Kebijakan (Perda/Perbup) mengatur	Data dari Kab/Kota							
			3.	Insentif Ekonomi	Persaingan usaha	KPPU, LKPP, IDI							
					Tata kelola pengadaan	LKPP							
			3.	Meningkatnya Keberdayaan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Dimensi Keberdayaan Ekonomi: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula				Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																								
	Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan		penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi Keberdayaan Ekonomi dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi dalam aktivitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi) Variabel Partisipasi dalam aktivitas ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Sensus/ Proyeksi Penduduk</td></tr><tr><td>2.</td><td>PDRB ADHB</td><td>Nilai PDRB ADHB</td><td>BPS</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>BPS</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>BPS</td></tr><tr><td>5.</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>BPS</td></tr></table>	No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk	2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS	3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS	4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS	5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS		
No.	Indikator	Item	Sumber Data																										
1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk																										
2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS																										
3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS																										
4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS																										
5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS																										

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					bangunan tempat tinggal			
					Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal	DTSEN		
					Omzet usaha	DTSEN		
					Aset bergerak	DTSEN		
					Aset tidak bergerak	DTSEN		
					Kepemilikan ternak	DTSEN		
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	Jumlah Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman ----- x 100% Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial Keterangan: Perbandingan Jumlah Pilar Sosial / PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai pedoman pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial tahun (n)				Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pilar Sosial / Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya		
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319

Telp. (0351) 895021 Faks. (0351) 895021

Email: dinsos@magetan.go.id Website: dinsos.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, S.E., M.M.

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197212211993021002

Pihak Kedua,



NIZHAMUL, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,89 Persen
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,29 Persen
3.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,05 Persen
4.	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,40 Persen
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,50

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 5.829.029.800,-	-
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.851.459.590,-	-
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 3.803.046.650,-	-
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 110.343.150,-	-
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 100.000.000,-	-
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.435.821.960,-	-
JUMLAH		Rp. 16.129.701.150,-	

Magetan, 13 Januari 2025

P. BUPATI MAGETAN


NIZHAMUL, S.E., M.M.


KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197212211993021002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,

Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Jabatan : Bupati

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 3 November 2025



Pihak Pertama,



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197212211993021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	58,83 Angka
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,87 Angka
3.	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	60,09 Angka
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	31,31 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,34 Skor
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,50 Skor

No	Program	Anggaran	Ket
1.	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.144.250.014	-
2.	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 5.984.036.325	-
3.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2.252.960.990	-
4.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 3.888.465.600	-

No	Program	Anggaran	Ket
5.	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 134.843.150	-
6.	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 97.655.100	-
JUMLAH		Rp 16.502.211.179	

Magetan, 3 November 2025

BUPATI MAGETAN



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

KEPALA DINAS SOSIAL



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197212211993021002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,

Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Jabatan : Bupati

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 21 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP 197212211993021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	64,63 Angka
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	76,88 Angka
3.	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	63,44 Angka
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	31,32 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	93,32 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,65 Skor

No	Program	Anggaran	Ket
1.	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.393.154.432	-
2.	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 485.000.000	-
3.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.695.000.000	-
4.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 3.560.559.000	-

No	Program	Anggaran	Ket
5.	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 81.041.000	-
6.	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 50.000.000	-
JUMLAH		Rp 10.264.754.432	

Magetan, 21 Januari 2026



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTRISNO, S.IP, MM

Jabatan : SEKRETARIS SEKRETARIAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

Pihak Pertama


SUTRISNO, S.IP, MM

Pembina
NIP. 198703092007011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	98.32 %
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	84.51 Skor

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.1	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.2	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.436.478.900	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.3	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.175.532	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.4	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.5	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kepala Dinas Sosial

PARIMTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

SEKRETARIS SEKRETARIAT

SUTRISNO, S.IP, MM

Pembina

NIP. 198703092007011002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI WIJAYANTI, SE.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,

ARI WIJAYANTI, SE.
Pembina
NIP. 197802082002122006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	100 %
		Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.1	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	485.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.1	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

ARI WIJAYANTI, SE.
Pembina
NIP. 197802082002122006



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI TJAHYO ARIBOWO, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,

DWI TJAHYO ARIBOWO, SE
Pembina
NIP. 197408242002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.1	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.560.559.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2.1	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	57.041.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.2	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)



PARMIRTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DWI TJAHYO ARIBOWO, SE
Pembina
NIP. 197408242002121002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTRISNO, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026

Pihak Pertama,

SUTRISNO, S.IP, MM

Pembina

NIP. 198703092007011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.1	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.685.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.2	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

Magetan, 21 Januari 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI
SOSIAL

SUTRISNO, S.IP, MM
Pembina
NIP. 198703092007011002



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

**SATUAN KERJA:
DINAS SOSIAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tripandita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63391
Telepon (0351) 897113, Laman inspektorat.magetan.go.id, Pos-el inspektorat@magetan.go.id

Nomor : 700/ ~~350~~ /403.060/2025

26 Juni 2025

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada
Dinas Sosial

Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan
di

M A G E T A N

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Sosial, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Sosial dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/26.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/29.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/26.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/36.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/29.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi atas implementasi SAKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi atas implementasi SAKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing - masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan *softcopy* ke alamat: <https://si-ksatria.magetan.go.id/> dan pengecekan dokumen yang diunggah melalui : <http://esr.menpan.go.id>
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Aplikasi Si Ksatria diakses melalui <https://si-ksatria.magetan.go.id/>

- c) Tim evaluator juga melaksanakan konfirmasi kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Evaluator Internal

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik,

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2024	2025
1)	Perencanaan Kinerja	30%	29,05	26,63
2)	Pengukuran Kinerja	30%	28,00	29,00
3)	Pelaporan Kinerja	15%	12,15	14,54
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13	23,14
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	92.33	93,31
	Kategori		AA	AA
	Interpretasi		Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Sosial telah mendapatkan nilai **93.31** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan**. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

Pada poin B.14 terdapat PK kepala Bidang / eselon III yang belum mencantumkan informasi anggaran program.

Pada poin C.19 Rencana Aksi yang disusun belum mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN yaitu pada Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya

b. Pengukuran Kinerja

Dari 6 indikator target dalam PK, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai 100% yaitu pada Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial

c. Pelaporan Kinerja

LKJIP sudah disusun cukup baik namun masih perlu perbaikan, pada tabel 3.5 dan 3.8 LKJIP belum diberikan penjelasan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat Target PK Perubahan 2024 tidak tercapai yaitu pada Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial target : 0,04 sedangkan Realisasi : 0,038. Serta Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial target : 0,28 sedangkan realisasi : 0,259

3. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Pada poin B.14 agar melengkapi PK Kepala Bidang/Eselon III yang terdapat PK kepala Bidang/Eselon III informasi anggaran program.

Pada poin C.19 agar menyusun Rencana Aksi yang mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN yaitu pada Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya

b. Pengukuran Kinerja

Agar menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi.

c. Pelaporan Kinerja

Agar melengkapi penjelasan pada dokumen LKJIP table 3.5 dan 3.8.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

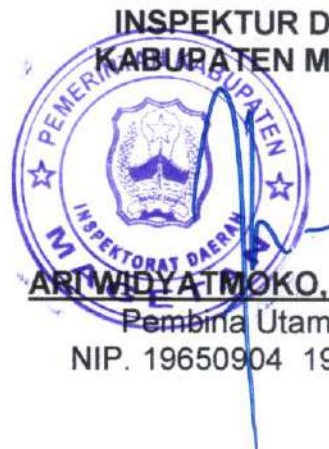
Agar menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi serta dilengkapi permasalahan/kendala dan solusi dalam upaya pencapaian target rencana aksi.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Sosial. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran

memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP kedepannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**



ARI WIDYATMOKO, S.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 198603 1001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Jawa Timur 63319,
Telepon (0351) 895021, Laman dinsos.magetan.go.id, Pos-el dinsos@magetan.go.id

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL OPD TAHUN 2025

Nama OPD : DINAS SOSIAL

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	BUKTI DUKUNG (Upload pada Link)	HAMBATAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Perencanaan Kinerja				https://bit.ly/BuktiDukung-RTLAKIPOP-2025		
	Pada poin B.14 terdapat PK Kepala Bidang / eselon III yang belum mencantumkan informasi anggaran program.	Pada poin B.14 agar melengkapi PK Kepala Bidang/Eselon III yang terdapat PK kepala Bidang/Eselon III informasi anggaran program.	Melengkapi PK Kepala Bidang/Eselon III dengan informasi anggaran program.	PK Kepala Bidang/Eselon III telah dilengkapi dengan informasi anggaran program.			
	Pada poin C.19 Rencana Aksi yang disusun belum mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN yaitu pada Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya.	Pada poin C.19 agar menyusun Rencana Aksi yang mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN yaitu pada Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya.	Menyusun Rencana Aksi yang mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN yaitu pada Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya.	Telah menyusun Rencana Aksi yang mengakomodir seluruh perubahan setelah POKIN.			
b.	Pengukuran Kinerja						
	Dari 6 indikator target dalam PK, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai 100% yaitu pada Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial.	Agar menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi.	Menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi.	Rencana Aksi TA. 2025 telah disusun dan akan dilaksanakan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi.			
c.	Pelaporan Kinerja						
	LKJIP sudah disusun cukup baik namun masih perlu perbaikan, pada tabel 3.5 dan 3.8 LKJIP belum diberikan penjelasan.	Agar melengkapi penjelasan pada dokumen LKJIP tabel 3.5 dan 3.8.	Melengkapi penjelasan pada dokumen LKJIP tabel 3.5 dan 3.8.	Penjelasan pada dokumen LKJIP 3.5 dan 3.8 telah dilengkapi.			
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	BUKTI DUKUNG (Upload pada Link)	HAMBATAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terdapat Target PK Perubahan 2024 tidak tercapai yaitu pada Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial target : 0,04 sedangkan realisasi : 0,038. Serta Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial target : 0,28 sedangkan realisasi 0,259.	Agar menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi serta dilengkapi permasalahan/kendala dan solusi dalam upaya pencapaian target rencana aksi.	Menyusun rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum sesuai dengan target serta melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi dan melengkapi permasalahan/kendala serta solusi dalam upaya pencapaian target rencana aksi.	Telah menyusun Rencana Aksi dan melaksanakan evaluasi Rencana Aksi TA. 2025 secara berkala serta mengidentifikasi permasalahan/ kendala serta solusi dalam pencapaian target di Tahun 2025.			

Magetan, 5 Maret 2026



KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
NIP. 197212211993021002

POHON KINERJA DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025-2029 (2026-2030)

https://si-ksatria.magetan.go.id/view-pohon-kinerja-opddinas-sosial/?
key_sakip=
MTc3MjAwNDQzNjAwMDM0YzZjNDdmYzNIMGE0ZmY1NzhlOTk1ZDg
5Y2IzNTk4MTc3MjAwNDQzNjAwMA==&id_skpd=2227&id=16238&id_
jadwal=16

Secara lebih jelas dapat dilihat pada link berikut:
https://si-ksatria.magetan.go.id/halaman-detail-pengisian-cascading-opd/?key_sakip=MTc3MjAwNDQzMTAwMDM0YzZjNDdmYzNlMGE0ZmY1NzhiOTk1ZDg5Y2lzMNTk4MTC3MjAwNDQzMTAwMA==&id_skpd=2227&id_periode=35#

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	IND: 1. PERSENTASE DATA FAKIR MISKIN YANG TERVERIFIKASI TERHADAP TOTAL DATA YANG MASUK		
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
SUB KEGIATAN	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
	IND: 1. JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIDATA	IND: 1. JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH PENERIMA MANFAAT (PM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	
	SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT	

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA				PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA			
	IND: 1. JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL				IND: 1. JUMLAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA			
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN MAKANAN		PENYEDIAAN SANDANG		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	
	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKINAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH KAMPUNG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	
SUB KEGIATAN	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	
	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
	SATUAN KERJA : 1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

KEGIATAN	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	
	IND: 1. JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/KELURAHAN ASAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
SUB KEGIATAN	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM DAN LUAR NEGERI DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	
	IND: 1. JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM DAN LUAR NEGERI YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN							
	SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT							

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

KEGIATAN	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL						REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR						IND: 1. PERSENTASE PMKS LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA YANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DI LUAR PANTI	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL						SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN PERMAKINAN	PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN ALAT BANTU	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN
	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKINAN SESUI DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH PESERTA BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH ORANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SUB KEGIATAN	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA							
	IND: 1. JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA							
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL							

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN	
	SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT	

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEGIATAN	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	IND: 1. JUMLAH FASILITASI IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DITERBITKAN				IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL				SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG				PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			
	IND: 1. JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG				IND: 1. JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL				SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE PSKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK		IND: 1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT	

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEGIATAN	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	IND: 1. PERSENTASE PSKS YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL							
SUB KEGIATAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)			
	IND: 1. JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				IND: 1. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN FASILITASI DALAM PENANGANAN KASUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL				SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
SUB KEGIATAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSEORANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSEORANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			
	IND: 1. JUMLAH PENYULUH SOSIAL, PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT, PEKERJA SOSIAL, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN/ATAU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN YANG MENINGKAT KAPASITASNYA				IND: 1. JUMLAH PENYULUH SOSIAL, PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT, PEKERJA SOSIAL, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN/ATAU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN YANG MENINGKAT KAPASITASNYA			
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL				SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			

CASCADING
DINAS SOSIAL
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG INKLUSIF							
	IND: 1. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL							
SASARAN	MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PERANAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS		MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN		MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	IND: 1. NILAI DIMENSI KEBUTUHAN DASAR		IND: 1. NILAI DIMENSI PERANAN SOSIAL		IND: 1. NILAI DIMENSI KEBERDAYAAN EKONOMI		IND: 1. PERSENTASE PILAR SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI PEDOMAN	
	SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. DINAS SOSIAL	
PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	IND: 1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		IND: 1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI		IND: 1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
								
								
								
								

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

KEGIATAN	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	
	IND: 1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
SUB KEGIATAN	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
	IND: 1. JUMLAH MAKAM YANG TERPENUHI PEMELIHARANNYA PADA TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN/KOTA	IND: 1. JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

☐ Tampilkan Pohon Kinerja

PROGRAM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	IND:	IND:	IND:	IND:	IND:	IND:	IND:	IND:
	1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI	1. PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	1. PERSENTASE PPKS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	1. PERSENTASE PPKS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KOMPETENSI DAN KUALITASNYA DALAM PELAYANAN SOSIAL	1. PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	1. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KESEKRETARIATAN 2. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SATUAN KERJA : 1. SEKRETARIAT

Cascading Kegiatan dan Sub Kegiatan

[illegible]

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran 2025**

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						REALISASI KEGIATAN PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	TW-I	TW-II	TW-III				TW-IV
	POKIRI LEVEL 2		POKIRI LEVEL 3		POKIRI LEVEL 4		POKIRI LEVEL 5																
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial							Persen	99.88	0	0	0	00.89	00.89	0	0	00.89	00.89	100.00%			
1.1			Memastikan Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS	Persentase Bantuan Sosial bagi PPKS yang Tersalur					Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
1.1.1					Melaksanakan Pemberian Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase Jaminan Sosial bagi PPKS yang Diberikan			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
1.1.1.1					Melaksanakan Proses Pengusulan PBI-D dan PBI-JKN	Jumlah Dokumen Pengusulan PBI-D dan PBI-JKN		Dokumen	0	30	30	30	30	120	30	30	30	30	30	100.00%			
1.1.1.2					Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Usulan PBI-D	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Usulan PBI-D		Dokumen	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	100.00%			
1.1.1.3					Melaksanakan Pelayanan untuk Fasilitas Bales Maskin Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Fasilitas Bales Maskin Provinsi		Dokumen	0	30	30	30	30	120	30	30	30	30	30	100.00%			
1.1.1.4					Melaksanakan Pelayanan untuk Fasilitas Bantuan Sosial Insidentil untuk Pengobatan dan Operasional	Jumlah Dokumen Pelayanan Fasilitas Bantuan Sosial Insidentil untuk Pengobatan dan Operasional		Dokumen	0	90	90	90	90	360	90	90	90	90	90	100.00%			
1.1.2					Melaksanakan Perlindungan Sosial bagi PPKS	Persentase Perlindungan Sosial yang Terlaksana		Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%				
1.1.2.1					Melaksanakan Penyaluran Bantuan Sembako bagi PPKS	Jumlah PPKS yang Memperoleh Bantuan Sembako		Orang	0	0	1200	0	965	2165	0	0	1200	965	100.00%				
1.1.2.2					Menyapkan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Bansos PKH, Program Sembako, Pemukiman dan RST	Jumlah Penerima Layanan Pendampingan Bansos PKH, Program Sembako, Pemukiman dan RST		KPM	0	27810	27810	27810	27810	27810	27810	27810	27810	27810	26575	104.65%			
1.1.2.3					Menyapkan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai		Orang	2324	0	0	2018	306	2324	0	0	2179	0	93.78%	Beberapa penerima manfaat resign, pindah ke luar kota, double bansos dan meninggal dunia	Tidak ada pengertian penerima manfaat sudah masuk dalam SK Bupati		
1.2			Memastikan Tersedianya Data DTKS yang Up to Date	Jumlah Data DTKS yang Up to Date					orang	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	336576	80.83%	Jumlah DTKS meningkat karena adanya pemutakhiran menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang merupakan kolaborasi data dari DTKS, REGSOSEK dan Kemiskinan Ekstrem	Mulai bulan Februari 2025, DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) resmi berlaku dan mulai digunakan sebagai acuan utama data kemiskinan dan bantuan sosial (menggariskan DTKS)	
1.2.1					melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS	Jumlah Usulan dan Eliminasi Data DTKS		orang	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	272045	336576	80.83%	Jumlah DTKS meningkat karena adanya pemutakhiran menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang merupakan kolaborasi data dari DTKS, REGSOSEK dan Kemiskinan Ekstrem	Mulai bulan Februari 2025, DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) resmi berlaku dan mulai digunakan sebagai acuan utama data kemiskinan dan bantuan sosial (menggariskan DTKS)	
1.2.1.1						menyusun pemutakhiran data DTKS	Persentase Data DTKS yang Dimutakhirkan	persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%				
1.2.1.2						menyapkan pengesahan usulan dan eliminasi DTKS	Persentase Pemutakhiran data DTKS yang Disahkan	persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%				
1.2.1.3						menyapkan layanan data dan pengaduan	Persentase Layanan Data dan Pengaduan Masyarakat yang Ditangani	persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%				
1.2.2					melaksanakan movev kecamatan dan desa/kelurahan dalam updating DTKS	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Aktif Melakukan Updating DTKS		desa/kelurahan	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	100.00%			
1.2.2.1						menyapkan kapasitas SDM operator kecamatan dan desa/kelurahan	Jumlah Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Lulus Pelatihan	orang	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	100.00%			
1.2.2.2						menyapkan movev bagi operator kecamatan dan desa/kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Movev bagi Operator Desa/Kelurahan	kal	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	100.00%			
1.2.2.3						menyapkan pelaksanaan mobilitas desa/kelurahan yang aktif pengelolaan data DTKS	Jumlah Desa/Kelurahan yang pengelolaan data DTKS baik	desa/kelurahan	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	100.00%			
1.3			Memastikan Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS korban bencana	Persentase Bantuan Sosial bagi PPKS korban bencana yang Tersalur					persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
1.3.1					Meningkatnya Layanan Bantuan bagi Korban Bencana	Jumlah Penerima Layanan Bantuan bagi Korban Bencana		orang	100	25	25	25	25	100	40	30	5	25	100.00%				
1.3.1.1						menyapkan penyaluran bantuan sembako bagi korban bencana	Jumlah Penerima Layanan Bantuan sembako bagi Korban Bencana	orang	100	25	25	25	25	100	40	30	5	25	100.00%				
1.3.1.2						menyapkan penyaluran bantuan sarpras bagi korban bencana	Jumlah Penerima Layanan Bantuan sarpras bagi Korban Bencana	orang	50	15	10	15	10	50	10	15	10	15	100.00%				
1.3.1.3						Tersedianya Layanan Dapur Umum	Jumlah Penerima Layanan Dapur Umum	Orang	200	50	50	50	50	200	50	50	50	50	100.00%				
1.3.2					Meningkatnya Peran Tagana dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Meningkatkan Perannya dalam Penanganan Bencana		Orang	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100.00%			
1.3.2.1						Meningkatnya Peran Tagana dalam Penanganan Bencana	Jumlah kegiatan penanganan bencana yang dilaksanakan	Kegiatan	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%				
1.3.2.2						Meningkatnya Sinergi Tagana dengan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Tagana Go To School dan Tagana Teman Masyarakat	Kegiatan	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	100.00%				
1.3.2.3						Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Anggota Tagana	Jumlah Anggota Tagana yang Diberikan Pembinaan	Orang	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100.00%			

No	KEGIATAN UTAMA		INDIKATOR	RENCANA HASIL KERJA RHK LEVEL 2 POKIN LEVEL 3	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA RHK LEVEL 3 POKIN LEVEL 4		INDIKATOR	URAIAN TEKNIK KEGIATAN RHK LEVEL 4 POKIN LEVEL 5		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						REALISASI KEGIATAN PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
	RHK LEVEL 1	KEGIATAN UTAMA				RHK LEVEL 3	POKIN LEVEL 4		RHK LEVEL 4	POKIN LEVEL 5			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial							Persen	0.259	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0.29	100.00%				
2.1			Memasukkan Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS dan PPKS Lainnya	Persentase PPKS dan PPKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial					Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%					
2.1.1					Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Terlarut	Persentase Disabilitas Terlarut yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%					
2.1.1.1					Melaksanakan Penyuluhan Alat Bantu Mobilitas bagi Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Menerima Alat Bantu			Orang	0	0	0	0	65	65	0	0	0	65	100.00%					
2.1.1.2					Melaksanakan Pengiriman ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa	Jumlah ODGJ yang mendapat layanan rujukan			Orang	0	5	5	5	5	20	5	0	10	5	100.00%					
2.1.1.3					Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Rumah Terapi Disabilitas CP	Jumlah Disabilitas CP yang Mendapatkan Layanan Rumah Terapi			Orang	25	45	45	45	45	45	45	45	45	47	104.44%					
2.1.1.4					Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Bancos ASPD	Jumlah Penerima Bancos ASPD			Orang	0	0	46	0	61	61	0	0	42	55	90.16%	Terdapat beberapa penerima bancos ASPD yang meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan pencairan dan double entry	Penerima manfaat yang meninggal di awal/perengahan tahun sudah dilakukan penggantian di PAK, namun yang meninggal di PAK tidak dapat dilakukan penggantian penerima sehingga tidak direalisasikan			
2.1.2					Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlarut	Persentase Lanjut Usia Terlarut yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%					
2.1.2.1					Melaksanakan Penyuluhan Alat Bantu Mobilitas bagi Lansia Terlarut	Jumlah Lansia Terlarut yang Menerima Alat Bantu			Orang	0	0	0	0	57	57	0	0	0	57	100.00%					
2.1.2.2					Terlaksananya Layanan Shelter Lansia Terlarut	Jumlah Lansia Terlarut yang Mendapatkan Layanan Shelter Lansia			Orang	22	22	22	22	22	22	19	24	28	32	145.45%					
2.1.2.3					Melaksanakan Penyuluhan Bancos Permakanan Bunda Kasih	Jumlah Penerima Bancos Permakanan Bunda Kasih			Orang	0	0	350	0	431	431	0	0	297	414	96.06%	Terdapat beberapa penerima bancos bunda kasih yang meninggal dunia, pindah domisili, double bancos dan double entry	Penerima manfaat yang meninggal di awal/perengahan tahun sudah dilakukan penggantian di PAK, namun yang meninggal di PAK tidak dapat dilakukan penggantian penerima sehingga tidak direalisasikan			
2.1.3					Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlarut	Persentase Anak Terlarut yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%					
2.1.3.1					Melaksanakan Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan bagi Anak Terlarut ke UPT Provinsi	Jumlah Anak Terlarut yang Difasilitasi Pelatihan Kewirausahaan			Orang	20	0	10	0	10	20	4	11	2	3	100.00%					
2.1.4					Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Persen	100	25	50	75	100	100	25	25	25	25	100.00%					
2.1.4.1					Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Direunifikasi			Orang	0	5	5	5	10	25	10	5	5	5	100.00%					
2.1.5					Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%					
2.1.5.1					Tersedianya Layanan Rumah Singgah	Jumlah Penerima Layanan Rumah Singgah			Orang	0	5	5	5	5	20	0	10	0	10	100.00%					
3	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial							Persen	0.038	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0.05	100.00%				
3.1			Memasukkan Terlaksananya Upaya Pemberdayaan Usaha bagi PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Usaha					Persen	100	25	50	75	100	100	0	0	87.5	0	87.50%					
3.1.1					Mengkoordinir Penyuluhan Bantuan Sosial WRSE	Jumlah WRSE yang Menerima Bantuan Modal Usaha			orang	50	0	40	0	0	40	0	0	35	0	87.50%	KPM WRSE tidak cair 5 orang dikarenakan pindah domisili, kerja di luar negeri dan tidak memenuhi persyaratan pencairan	Tidak ada penggantian PM pada saat PAPBD			
3.1.1.1					Terlaksananya Penyuluhan Bantuan Modal Usaha bagi KUBE	Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi WRSE			Orang	0	0	40	0	0	40	0	0	35	0	87.50%	KPM WRSE tidak cair 5 orang dikarenakan pindah domisili, kerja di luar negeri dan tidak memenuhi persyaratan pencairan	Tidak ada penggantian PM pada saat PAPBD			
3.1.1.2					Menyajikan Berkas Administrasi Penyuluhan Bantuan Modal Usaha bagi WRSE	Jumlah Dokumen Administrasi Penyuluhan Bantuan Modal Usaha bagi WRSE			Dokumen	0	0	40	0	0	40	0	0	35	0	87.50%	KPM WRSE tidak cair 5 orang dikarenakan pindah domisili, kerja di luar negeri dan tidak memenuhi persyaratan pencairan	Tidak ada penggantian PM pada saat PAPBD			
3.1.2					Mengkoordinir Pelaksanaan Pelatihan Usaha bagi PPKS	Persentase Pelatihan Usaha bagi PPKS yang Terlaksana			Persen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0.00%					
3.1.2.1					Terlaksananya Pelatihan Usaha bagi PPKS	Jumlah PPKS yang Lulus Pelatihan Usaha			Orang	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0.00%	Tidak melaksanakan kegiatan pelatihan usaha karena adanya efisiensi anggaran	Tidak melaksanakan pelatihan sendiri tetapi mengirimkan PPKS untuk mengikuti pelatihan di UPT Provinsi maupun Balai Kementerian			
3.1.2.2					Menyajikan Dokumen Administrasi Pelatihan Usaha bagi PPKS	Jumlah Dokumen Administrasi Pelatihan Usaha bagi PPKS			Dokumen	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0.00%	Tidak melaksanakan kegiatan pelatihan usaha karena adanya efisiensi anggaran	Tidak melaksanakan pelatihan sendiri tetapi mengirimkan PPKS untuk mengikuti pelatihan di UPT Provinsi maupun Balai Kementerian			
4	Meningkatnya Peran PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Adik dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							Persen	5.3	0	0	0	0	5.4	5.4	0	0	5.24	0	97.04%	Realisasi Kinerja tidak mencapai 100% karena terdapat pemberian bantuan permakanan bagi LKSA, namun dari target 22 LKSA hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal serta ada rumah yang tidak direalisasikan karena lembaga tidak memenuhi persyaratan pencairan dan double entry.	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur		
4.1			Memasukkan Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan bagi PPKS	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelatihan bagi PPKS					Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	19.81	94.81%	Realisasi Kinerja tidak mencapai 100% karena terdapat pemberian bantuan permakanan bagi LKSA, namun dari target 22 LKSA hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal serta ada rumah yang tidak direalisasikan karena lembaga tidak memenuhi persyaratan pencairan dan double entry.	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur			

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						REALISASI KEGIATAN PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
	RHK LEVEL 1 POKOK LEVEL 2		RHK LEVEL 2 POKOK LEVEL 3		RHK LEVEL 3 POKOK LEVEL 4		RHK LEVEL 4 POKOK LEVEL 5			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
	1		4		5		6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4.1.1					Melaksanakan Pembudayaan bagi Lembaga Sosial	Persentase Lembaga Sosial yang Dibendayakan			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	94.81%	Realisasi Kinerja tidak mencapai 100% karena terdapat pemberian barituan pemakanan bagi LKSA, namun dari target 22 LKSA hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal serta ada hibah yang tidak direalisasikan karena lembaga tidak memenuhi persyaratan pencairan dan double entry.	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur
4.1.1.1							Terlaksananya Penyaluran Hibah kepada Lembaga Sosial	Jumlah Lembaga Sosial yang Menerima Hibah	Lembaga	0	80	50	65	0	105	62	95	31	1	96.92%	Beberapa lembaga penerima hibah tidak melengkapi dokumen persyaratan pencairan hibah dan ada double entry pada DPA	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur
4.1.1.2							Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Pengelola LKS	Jumlah Pengelola LKS yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi	Lembaga	0	0	0	24	0	24	0	0	20	0	83.33%	Pembinaan LKSA diberikan melalui bantuan pemerintah hidup layak bagi LKSA, namun hanya 20 LKSA yang mengajukan proposal	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur
4.1.1.3							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Lembaga Karang Taruna	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Karang Taruna	Kegiatan	0	1	1	5	1	6	1	1	5	1	100.00%		
4.1.1.4							menyampaikan penerbitan akreditasi bagi LKS	Jumlah LKS yang Terakreditasi	lembaga	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0.00%	Tidak ada pengajuan akreditasi dari lembaga sosial	
4.1.1.5							menyapkan fasilitas penerbitan STP/STPU bagi LKS	Jumlah LKS yang Memperoleh STP/STPU	lembaga	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	50.00%	Penerbitan STPU sesuai dengan ajuan dari LKSA	
4.1.2					Melaksanakan Pelatihan bagi PSKS	Persentase Pelatihan bagi PSKS yang Terlaksana			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%		
4.1.2.1							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas bagi TKSK	Jumlah TKSK yang Meningkat Kapasitasnya	orang	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100.00%		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial						Angka	92.33	0	0	0	92.34	92.34	0	0	0	93.31	101.05%		
									Angka	87.45	0	0	0	87.5	87.5	0	0	0	87.61	100.13%		
									Angka	83.99	0	0	0	84.5	84.5	0	0	0	84.5	100.00%		
5.1			Memastikan terlaksananya pelayanan kesekretariatan Dinas Sosial berjalan dengan baik	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan					Angka	83.99	0	0	0	84.5	84.5	0	0	0	84.5	100.00%		
5.1.1					Menyediakan dokumen kelengkapan gaji dan tunjangan serta TPP pegawai Dinas Sosial	Jumlah pegawai yang memerita pelayanan gaji dan TPP			Dokumen	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.1.1							Menyediakan dokumen kelengkapan gaji dan tunjangan pegawai Dinas Sosial	Jumlah dokumen kelengkapan gaji dan tunjangan pegawai Dinas Sosial	Dokumen	14	3	5	3	3	14	3	5	3	3	100.00%		
5.1.1.2							Melakukan rekon gaji dengan BPKPD	Jumlah laporan rekon gaji dengan BPKPD	Laporan	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	100.00%		
5.1.1.3							Monitoring persediaan kebutuhan gaji dan TPP pegawai Dinas Sosial	Jumlah Laporan persediaan kebutuhan gaji dan TPP pegawai Dinas Sosial	Laporan	24	6	6	6	6	24	6	6	6	6	100.00%		
5.1.1.4							Menyediakan dokumen kelengkapan TPP pegawai Dinas Sosial	Jumlah dokumen kelengkapan TPP pegawai Dinas Sosial	Dokumen	14	3	5	3	3	14	3	5	3	3	100.00%		
5.1.2					Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.2.1							Melakukan monitoring kondisi kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan monitoring kondisi kendaraan dinas jabatan	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.2.2							Pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit yang dibayarkan pajaknya	Unit	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00%		
5.1.2.3							Melaksanakan pemeliharaan/ perbaikan kendaraan dinas jabatan dan penggantian suku cadang	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara/ diperbaiki	Unit	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100.00%		
5.1.2.4							Melakukan perawatan gedung Dinas Sosial sesuai kebutuhan	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	5	1	1	2	1	5	1	1	2	1	100.00%		
5.1.2.5							Melakukan perawatan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	Sarana Prasarana	80	20	20	20	20	80	20	20	20	20	100.00%		
5.1.2.6							Melakukan monitoring kondisi kendaraan dinas lapangan	Jumlah laporan monitoring kondisi kendaraan dinas lapangan	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.2.7							Pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah unit yang dibayarkan pajaknya	Unit	19	0	0	10	9	19	0	0	8	11	100.00%		
5.1.2.8							Melaksanakan pemeliharaan/ perbaikan kendaraan dinas lapangan dan penggantian suku cadang	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara/ diperbaiki	Unit	5	1	1	2	1	5	1	1	2	1	100.00%		
5.1.3					Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah			Laporan	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.3.1							Persediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	Paket	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		
5.1.3.2							Persediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		
5.1.3.3							Persediaan kebutuhan peralatan rumah tangga Dinas Sosial	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		
5.1.3.4							Persediaan makanan dan minuman rapat staf dan kegiatan serta jamuan tamu yang disediakan	Jumlah paket makanan dan minuman rapat staf dan kegiatan serta jamuan tamu yang disediakan	Paket	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		
5.1.3.5							Persediaan barang cetak/ penggandaan (map, amplop dan lain-lain) yang disediakan	Jumlah paket barang cetak/ penggandaan (map, amplop dan lain-lain) yang disediakan	Paket	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		

No	KEGIATAN UTAMA	REKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KEMAJUAN	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KEMAJUAN	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						REALISASI KEGIATAN PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
	RHK LEVEL 1 POKOK LEVEL 2		RHK LEVEL 2 POKOK LEVEL 3		RHK LEVEL 3 POKOK LEVEL 4		RHK LEVEL 4 POKOK LEVEL 5			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.1.3.6							Penyediaan kebutuhan informasi dan wawasan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.3.7							Menyediakan kebutuhan perjalanan dinas pegawai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.3.8							Melakukan stok opname barang pakai habis produksi kegiatan	Jumlah laporan sisa persediaan (stok opname)	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.3.9							Melakukan pembatasan arsip sesuai dengan jenis dan klasifikasinya	Jumlah dokumen arsip yang sudah diinventarisir	Dokumen	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.3.10							Melakukan identifikasi dan verifikasi surat melalui aplikasi elektronik	Jumlah surat yang diverifikasi	Surat	360	90	90	90	90	360	90	90	90	90	100.00%		
5.1.3.11							Menyusun agenda surat menyurat yang tertib dan rapi	Jumlah surat masuk surat keluar dan nota dinas disposisi pimpinan yang teranalisa	Surat	1200	300	300	300	300	1200	300	300	300	300	100.00%		
5.1.3.12							Tertelaksananya Pengamanan Kantor Secara Menyeluruh	Jumlah Kegiatan Terkait Pengamanan Kantor	Kegiatan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4					Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa pendukung pelaksanaan kegiatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola dalam kondisi baik			Laporan	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4.1							Melakukan pembayaran tagihan bulanan rutin (listrik, air, dan telepon)	Jumlah laporan pembayaran tagihan bulanan rutin	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4.2							Menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (servis/ perbaikan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4.3							Penyusunan draft kontrak kerja dengan tenaga outsourcing	Jumlah dokumen draft kontrak yang disusun	Dokumen	13	3	3	3	3	13	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4.4							Menyediakan gaji tenaga outsourcing	Jumlah laporan penyediaan gaji tenaga outsourcing	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.4.5							Menyediakan absensi tenaga outsourcing	Jumlah laporan absensi tenaga outsourcing	Laporan	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.5					Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai aturan berlaku	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai aturan berlaku			Orang	24	30	30	30	30	30	3	3	3	21	100.00%		
						Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun			Dokumen	0	0	0	0	12	12	0	0	0	12	100.00%		
5.1.5.1							Tersedianya dokumen atau laporan pengajuan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai	Jumlah dokumen pengajuan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai	Dokumen	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.5.2							Pengelolaan dan pembaruan data kepegawaian	Jumlah update data kepegawaian	Data	30	7	7	8	8	30	7	7	8	8	100.00%		
5.1.5.3							Tersedianya berkas kepegawaian laporan cuti dan kehadiran pegawai	Jumlah Berkas Kepegawaian Laporan Cuti dan Kehadiran Pegawai	Berkas	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.5.5							Tersedianya data pegawai yang diisikan BIMTEK atau Diklat	Jumlah Data Pegawai yang Diisikan BIMTEK atau Diklat	Data	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%		
5.1.5.6							Tertelaksananya evaluasi kelembagaan OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD	Laporan	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	100.00%		
5.1.5.7							Tertelaksananya penilaian pelayanan publik	Jumlah Laporan Penilaian Pelayanan Publik	Laporan	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	100.00%		
5.1.5.8							Tertelaksananya pemohonan kegiatan magang dari sekolah dan universitas	Jumlah Data Pemohon Kegiatan Magang	Data	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2	100.00%		
5.1.6					Tertelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Scrapen Anggaran Perangkat Daerah			Persen	0	10	40	30	10	60	21.25	23.62	28.01	19.23	102.34%		
5.1.6.1							Tertelaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	100.00%		
5.1.6.2							Tertelaksananya Administrasi keuangan yang baik dan sesuai	Jumlah Berkas Pengajuan SPV/SPM	Berkas	0	10	25	35	30	100	10	25	35	30	100.00%		
5.1.6.3							Tertelaksananya Laporan Pajak yang tepat waktu	Jumlah laporan pajak yang diperiksa dan dicocokkan dengan pemotongan	Laporan	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	100.00%		
5.1.6.4							Tertelaksananya Berita Acara Penutupan Kas Bulanan Bendahara Pengeluaran	Jumlah laporan kas bendahara	Laporan	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	100.00%		
5.1.6.5							Tertelaksananya Laporan Fungsional	Jumlah laporan SPJ Fungsional dan administratif yang disusun tepat waktu	Laporan	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	100.00%		
5.2			Mengkoordinasikan Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja Dinas Sosial	Persentase Ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Mendukung Tercapainya Sasaran Dinas Sosial					Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%		
									Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%		
5.2.1					Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial			dokumen	14	2	6	2	4	14	2	6	2	4	100.00%		
5.2.1.1							Menyusun draft dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan	Jumlah draft dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan	Dokumen	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100.00%		
5.2.1.2							Menyusun draft dokumen RUP dan RUP perubahan	Jumlah draft dokumen RUP dan RUP perubahan	dokumen	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100.00%		

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRWULAN						REALISASI KEGIATAN PER TRWULAN				CAPAIAN REALISASI (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI	
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AGBR	TW-I	TW-II	TW-III				TW-IV
	POKIR LEVEL 2		POKIR LEVEL 3		POKIR LEVEL 4		POKIR LEVEL 5																
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5.2.1.3							Menyusun draft dokumen Renja 2026 dan P-Renja 2025	Jumlah draft dokumen Renja 2026 dan P-Renja 2025	dokumen	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	100.00%			
5.2.1.4							Menyusun draft dokumen DPA, RKAP, DPPA dan RKA	Jumlah draft dokumen DPA, RKAP, DPPA dan RKA	dokumen	4	1	0	1	2	4	1	0	1	2	100.00%			
5.2.1.5							Menyusun draft dokumen rencana aksi	Jumlah draft dokumen rencana aksi	dokumen	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	100.00%			
5.2.1.6							Mengelola data sektoral	Jumlah dokumen Data Sektoral	dokumen	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	100.00%			
5.2.1.7							Menyusun draft dokumen Rencana	Jumlah draft dokumen Rencana	dokumen	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00%			
5.2.1.8							Menyusun draft dokumen Manajemen Risiko	Jumlah draft dokumen Manajemen Risiko	dokumen	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100.00%			
5.2.2					Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan	persentase Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja			persentase	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
5.2.2.1							Menyusun LPPD	Jumlah draft LPPD	Laporan	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100.00%			
5.2.2.2							Menyusun LKJP	Jumlah draft LKJP	dokumen	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100.00%			
5.2.2.3							Menyusun laporan Monev Renja	Jumlah draft laporan Monev Renja	laporan	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	100.00%			
5.2.2.4							Menyusun laporan RPK, TEPPRA, Rkap Belanja E-Katalog, Monev Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan RPK, TEPPRA, Rkap Belanja E-Katalog, Monev Pelaksanaan Kegiatan	laporan	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%			
5.2.2.5							Menyusun dan Mengkoordinasikan kecutupan dokumen SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP	dokumen	0	14	0	0	0	14	14	0	0	0	100.00%			
5.2.2.6							Menyusun Laporan Monev Pengadaan Barang/ dan Jasa (PBJ)	Jumlah Laporan Monev Pengadaan Barang/ dan Jasa (PBJ)	laporan	0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100.00%			
5.2.2.7							Menyusun Laporan SKM	Jumlah draft Laporan SKM	laporan	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00%			
5.2.2.8							Menyusun Laporan SPM / Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan SPM	laporan	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	100.00%			
5.2.2.9							Menyapkan Laporan Penyusunan SPSP / Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah draft Laporan SPSP	laporan	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	100.00%			
5.3			Memastikan Taman Makam Pahlawan Terkelola dengan Baik	Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik					Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
5.3.1					Mengkoordinir Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara			Persen	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100	100.00%			
5.3.1.1							Menyapkan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara Kebersihannya	Makam	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%			
5.3.1.2							Menyapkan Kegiatan Ziarah Makam Leluhur di Taman Makam Pahlawan Pada Saat Hari Jadi Kabupaten Magetan	Jumlah Laporan Ziarah Makam Leluhur di Taman Makam Pahlawan yang Terlaksana	Laporan	7	0	0	7	0	7	0	0	0	7	100.00%			

Magetan, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO SUPLUTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212211993021002

RENCANA AKSI DINAS SOSIAL Tahun Anggaran 2026

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar							Angka	64.63	0	0	0	64.63	64.63	
1.1			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					%	100	25	50	75	100	100	
1.1.1					Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN	Jumlah Data DTSEN yang dimutakhirkan			Orang	336977	336977	336977	336977	336977	336977	
1.1.1.1							Terlaksananya Fasilitas Jaminan Kesehatan	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Jaminan Kesehatan	Orang	282739	282563	282563	282563	282739	282739	
1.1.1.2							Tersedianya Surat Keterangan DTSEN	Jumlah Surat Keterangan DTSEN yang Tercetak	Surat	800	200	200	200	200	800	
1.1.1.3							Tersedianya Surat Keterangan DTSEN	Jumlah Surat Keterangan DTSEN yang Tercetak	Surat	800	200	200	200	200	800	
1.1.1.4							Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	120	30	30	30	30	120	
1.1.1.5							Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	120	30	30	30	30	120	
1.1.1.6							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Updating DTSEN	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Updating DTSEN	Kegiatan	12	3	3	3	3	12	
1.1.1.7							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Updating DTSEN	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Updating DTSEN	Kegiatan	12	3	3	3	3	12	
1.1.1.8							Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data PBI-D	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data PBI-D	Laporan	24	6	6	6	6	24	
1.1.1.9							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Dokumen	6	1	2	1	2	6	
1.1.1.10							Tersedianya Dokumen Fasilitas Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Jaminan Kesehatan yang Tercetak	Dokumen	180	45	45	45	45	180	
1.1.1.11							Tersedianya Surat Keterangan DTSEN	Jumlah Surat Keterangan DTSEN yang Tercetak	Surat	800	200	200	200	200	800	
1.1.2					Terlaksananya Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial			Orang	4534	100	246	2688	4534	4534	
1.1.2.1							Terlaksananya Penyaluran Bantuan Sembako bagi PPKS	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bantuan Sembako	Orang	2000	100	200	200	1500	2000	
1.1.2.2							Terlaksananya Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai	Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial dan Program BLT	Orang	2534	0	46	2488	2534	2534	
1.1.2.3							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	10	2	3	2	3	10	
1.1.2.4							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai	Dokumen	3	1	0	1	1	3	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3	RHK LEVEL 4		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4	POKIN LEVEL 5		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.2			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani					%	100	25	50	75	100	100		
1.2.1					Terlaksananya Layanan Tanggap Darurat Kebencanaan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sembako	Jumlah Penerima Layanan Dapur Umum		Orang	75	20	20	20	15	75		
									Orang	100	0	0	50	50	100		
1.2.1.1								Tersedianya Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Jumlah Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Laporan	70	15	20	15	20	70	
1.2.1.2								Tersedianya Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Jumlah Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Laporan	5	5	0	0	0	5	
1.2.1.3								Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
1.2.2					Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial bagi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan			Orang	50	5	10	15	20	50		
1.2.2.1								Tersedianya Berita Acara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Jumlah Berita Acara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Laporan	45	2	10	15	20	45	
1.2.2.2								Tersedianya Berita Acara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Jumlah Berita Acara Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Laporan	5	5	0	0	0	5	
1.2.2.3								Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
1.2.3					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Peran Tagana	Jumlah Tagana yang Melaksanakan Peningkatan			Orang	45	45	45	45	45	45		
1.2.3.1								Tersedianya Dokumen Persiapan Pengerahan Tagana dalam Kegiatan Penanganan Bencana	Jumlah Dokumen Persiapan Pengerahan Tagana dalam Penanganan Bencana	Dokumen	11	2	3	3	3	11	
1.2.3.2								Tersedianya Dokumen Persiapan Pengerahan Tagana dalam Kegiatan Penanganan Bencana	Jumlah Dokumen Persiapan Pengerahan Tagana dalam Penanganan Bencana	Dokumen	1	1	0	0	0	1	
1.2.3.3								Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
1.2.3.4								Terlaksananya Persiapan Kegiatan Sinergi Tagana dengan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Persiapan Sinergi Tagana dengan Masyarakat	Kegiatan	3	0	0	0	3	3	
2	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial							Angka	76.88	0	0	0	76.88	76.88		
2.1			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial					%	100	25	50	75	100	100		
2.1.1					Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan bagi	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan			Orang	375	25	375	25	375	375		
2.1.1.1								Tersedianya Data Penerima Program Permakanan Bunda Kasih	Jumlah Data Penerima Program Permakanan Bunda Kasih	Dokumen	2	0	2	0	0	2	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.2							Tersedianya Data Penerima Manfaat Shelter Rumah Lansia	Jumlah Data Penerima Manfaat Shelter Rumah Lansia	Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.1.1.3							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Pemakanan	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Pemakanan	Dokumen	4	1	1	1	1	4
2.1.2					Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sandang bagi	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan			Orang	30	5	10	5	10	30
2.1.2.1							Tersedianya Data Persediaan Sandang	Jumlah Data Persediaan Sandang	Dokumen	1	1	0	0	0	1
2.1.2.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Sandang	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Sandang	Dokumen	2	1	0	0	1	2
2.1.3					Terlaksananya Penyaluran Alat Bantu Mobilitas bagi	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas			Orang	100	20	30	20	30	100
2.1.3.1							Tersedianya Data Calon Penerima Alat Bantu Mobilitas	Jumlah Data Calon Penerima Alat Bantu Mobilitas	Dokumen	8	2	2	2	2	8
2.1.3.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Penyediaan Alat Bantu	Dokumen	4	1	1	1	1	4
2.1.4					Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan			Orang	40	10	10	10	10	40
2.1.4.1							Tersedianya Data PPKS Penerima Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Data PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dokumen	16	4	4	4	4	16
2.1.4.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dokumen	4	1	1	1	1	4
2.1.5					Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bimbingan Fisik,			Orang	30	0	15	0	15	30
2.1.5.1							Tersedianya Data PPKS Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Data PPKS yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dokumen	2	0	1	0	1	2
2.1.5.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dokumen	2	0	1	0	1	2
2.1.6					Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak			Orang	310	30	60	30	310	310
2.1.6.1							Tersedianya Data Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Jumlah Data Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Dokumen	17	4	4	4	5	17
2.1.6.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dokumen	4	1	1	1	1	4
2.1.7					Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Akses ke			Orang	75	65	65	65	75	75
2.1.7.1							Tersedianya Data PPKS Penerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Data PPKS yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dokumen	16	4	4	4	4	16

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.7.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dokumen	12	1	1	1	1	12
2.1.8					Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan bagi PPKS	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Layanan Rujukan			Orang	120	30	30	30	30	120
2.1.8.1							Tersedianya Data PPKS Penerima Layanan Rujukan	Jumlah Data PPKS yang Mendapatkan Layanan Rujukan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.1.8.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen	12	3	3	3	3	12
2.1.9					Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Orang	40	10	10	10	10	40
2.1.9.1							Tersedianya Data Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Jumlah Data Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Dokumen	24	6	6	6	6	24
2.1.9.2							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	1	1	1	1	4
3	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi							Angka	63.44	0	0	0	63.44	63.44
3.1			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial					%	100	25	50	75	100	100
3.1.1					Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan			Keluarga	37	0	37	0	0	37
3.1.1.1							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	43	3	38	1	1	43
3.1.1.2							Tersedianya Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Jumlah Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Dokumen	3	2	0	0	1	3
4	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman							%	31.32	0	0	0	31.32	31.32
4.1			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial					%	100	25	50	75	100	100
4.1.1					Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			Orang	38	18	18	18	38	38

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN					
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5								
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.1.1							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	17	4	4	4	5	17
4.1.1.2							Tersedianya Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perseorangan	Jumlah Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perseorangan	Dokumen	1	0	0	0	1	1
4.1.2					Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya			Lembaga	26	1	22	1	2	26
4.1.2.1							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2	3	2	3	10
4.1.2.2							Tersedianya Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat	Dokumen	4	2	0	1	1	4
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat							Nilai	93.32	0	0	0	93.32	93.32
									Skor	87.65	0	0	0	87.65	87.65
5.1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan					%	98.32	0	0	0	98.32	98.32
									Skor	84.51	0	0	0	84.51	84.51
5.1.1					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	9	6	0	2	1	9
5.1.1.1							Tersedianya Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Draf Analisis	9	6	0	2	1	9
5.1.1.2							Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	1	1	0	3
5.1.2					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan	308	88	88	66	66	308
5.1.2.1							Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pengajuan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Dokumen	14	4	4	3	3	14
5.1.2.2							Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pengajuan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Dokumen	14	4	4	3	3	14
5.1.2.3							Tersedianya Laporan Monitoring Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Monitoring Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	12	3	3	3	3	12
5.1.2.4							Tersedianya Bahan Rekonsiliasi Gaji dengan BPKPD	Jumlah Bahan Rekonsiliasi Gaji dengan BPKPD	Bahan	4	1	1	1	1	4
5.1.3					Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /			Laporan	12	3	3	3	3	12
5.1.3.1							Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	36	9	9	9	9	36

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 4	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.1.3.2							Tersedianya Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	36	9	9	9	9	36	
5.1.4					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan			Paket	6	0	6	0	0	6	
5.1.4.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dokumen	1	0	1	0	0	1	
5.1.5					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			Laporan	12	3	3	3	3	12	
5.1.5.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.6					Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Laporan	91	27	22	21	21	91	
5.1.6.1							Tersedianya Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Draf Analisis	50	17	12	11	10	50	
5.1.6.2							Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
5.1.6.3							Tersedianya Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Draf Analisis	41	10	10	10	11	41	
5.1.7					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			Paket	12	4	4	4	0	12	
5.1.7.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	2	1	1	0	0	2	
5.1.8					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Paket	12	6	6	0	0	12	
5.1.8.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Dokumen	2	1	1	0	0	2	
5.1.9					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	12	3	3	3	3	12	
5.1.9.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Logistik Kantor	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.10					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang			Paket	6	2	2	2	0	6	
5.1.10.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen	3	1	1	1	0	3	
5.1.11					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan			Dokumen	12	3	3	3	3	12	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 4	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5			13	14	15	16	17	18	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.1.11.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.12					Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			Laporan	12	3	3	3	3	12	
5.1.12.1							Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.13					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			Unit	1	1	1	1	1	1	
5.1.13.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.13.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Dserah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.14					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Unit	6	6	6	6	6	6	
5.1.14.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.14.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.15					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang			Unit	1	1	0	0	0	1	
5.1.15.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung	Dokumen	1	1	0	0	0	1	
5.1.15.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.16					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			Unit	1	0	1	0	0	1	
5.1.16.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	Dokumen	1	0	1	0	0	1	
5.1.16.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.17					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			Laporan	12	4	4	4	0	12	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 4	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.1.17.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	4	1	1	1	1	4	
5.1.17.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	24	6	6	6	6	24	
5.1.18					Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Laporan	12	3	3	3	3	12	
5.1.18.1							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	26	7	7	6	6	26	
5.1.18.2							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1548	387	387	387	387	1548	
5.1.18.3							Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	3	3	3	3	12	
5.1.19					Tersusunnya Dokumen Perubahan Perencanaan	Jumlah Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	5	0	0	1	4	5	
5.1.19.1							Tersedianya Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Draf Analisis untuk Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Draf Analisis	5	0	0	1	4	5	
5.1.19.2							Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	1	
5.1.20					Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik			Laporan	4	1	1	1	1	4	
5.1.20.1							Tersedianya Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	1	2	1	3	7	
5.1.21					Terkelolanya Dokumen Kepegawaian Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			Dokumen	52	16	12	12	12	52	
5.1.22					Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Orang	30	0	0	0	30	30	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-			Orang	30	30	30	30	30	30	
5.1.22.1							Terkelolanya Data Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikelola	Data	12	3	3	3	3	12	
5.1.22.2							Tersedianya Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	44	14	10	10	10	44	
5.1.22.3							Tersedianya Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	2	0	2	4	
5.1.22.4							Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Diklat Fungsional	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Diklat dan Bimtek Pegawai	Dokumen	12	3	3	3	3	12	

No	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR	URAIAN TEKNIS KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEGIATAN PER TRIWULAN						
	RHK LEVEL 1		RHK LEVEL 2		RHK LEVEL 3		RHK LEVEL 4			RHK LEVEL 5						
	POKIN LEVEL 2		POKIN LEVEL 3		POKIN LEVEL 4		POKIN LEVEL 5									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AWAL	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	AKHIR	
5.2			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik					%	100	25	50	75	100	100	
5.2.1					Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman			Makam	1	1	1	1	1	1	
5.2.1.1							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	38	9	9	10	10	38	
5.2.2					Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam			Laporan	7	0	0	0	7	7	
5.2.2.1							Tersedianya Dokumen Pendukung untuk Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	9	0	0	1	8	9	



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO BUDIYOMO, S.Sos., M.AP.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197212211993021002